



RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

JL. SEI BATUGINGGING NO 06 MEDAN Kec. Medan Baru Kode Pos : 20154

Website : <http://dkp.sumutprov.go.id/>

Facebook : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumut

Telp : 061-4568819/4153335

KATA PENGANTAR

Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, dimana Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Diharapkan Renja ini digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Renja ini berisikan gambaran tentang program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2024 dan yang akan direncanakan untuk tahun 2026, hasil-hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi, tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 serta dana indikatif dan sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan guna meningkatkan kinerja Program.

Disadari bahwa Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya.

Akhirnya, saya ingin mengajak semua pihak, marilah kita saling bahu membahu dengan semangat kemitraan, kita selenggarakan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 30 Juli 2025

 KERTANIDYAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
HAMIDYAN S. KRI SIREGAR, S. Sos, MM
Pejabat Muda
NIP. 19770826 200312 1 004

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD	13
2.1.1 Program Pengolahan Perikanan Tangkap	14
2.1.2 Program Pengolahan Perikanan Budidaya	15
2.1.3 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16
2.1.4 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17
2.1.5 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	18
2.1.6 Pengarusutamaan Gender (PUG), (GBS) dan (GAP)System.....	18
2.1.7 Evaluasi Capaian Stunting Provinsi Sumatera Utara	19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	41
2.3 Analisis Capaian Kinerja Keuangan	43
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	45
2.5 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	59
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	77
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	79
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	79
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	81
3.2.1 Tujuan	82
3.2.2 Sasaran	83
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	84
3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun secara GAP, GBS dan TOR/ KAK Pelaksanaan Kegiatan	95
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	105
4.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	105
4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja	106
4.3 Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.....	106
4.4 Indeks Ekonomi Biru.....	108
BAB V PENUTUP	143
LAMPIRAN.....	145

BAB I PENDAHULUAN

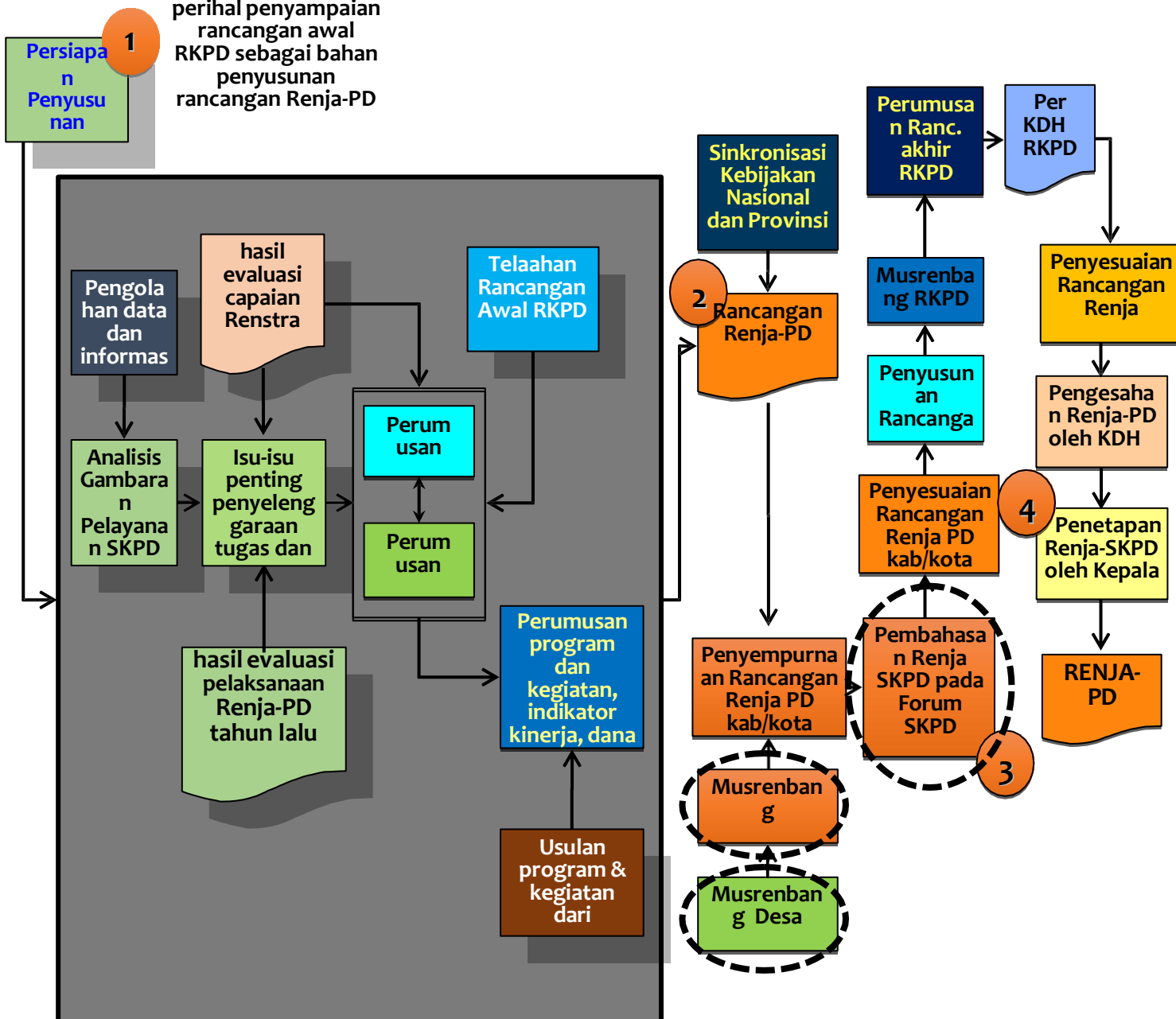
I.1. Latar Belakang

Proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024. Renja Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara diselaraskan dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), percepatan penurunan Stunting di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian disusul dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Peraturan ini mengatur perencanaan pada nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA PD

SE KDH
perihal penyampaian
rancangan awal
RKPD sebagai bahan
penyusunan
rancangan Renja-PD



Gambar 1. Alur Proses Penyusunan Renja Tahun 2026

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk

kepentingan masyarakat berdasarkan potensi daerahnya. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang Perencanaan Jangka Panjang. Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN). Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Potensi sumber daya ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak juga cukup besar. Pesisir Pantai Barat jenis ikan unggulannya berupa tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias. Budidaya kelautan antara lain berupa teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang. Pesisir Pantai Timur SDI-nya mencapai 276.030 ton/tahun dengan jenis ikan unggulan seperti di Pesisir Pantai Barat

ditambah dengan ikan baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari. Upaya pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara dilandaskan atas potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana serta sarana pendukung produksi. Faktor pendukung produksi juga meliputi peraturan perundang-undangan yang kondusif pendampingan. Selanjutnya, pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara juga merupakan upaya pemberian berbagai alternatif pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (welfare) hidupnya, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan basis komoditas unggulan yang kompetitif berlandaskan kemampuan regional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan permasalahan yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap maka bukan suatu pilihan yang salah, jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara saat ini dan dimasa yang akan datang. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara untuk Tahun 2026. Dimana Renja merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Provinsi Sumatera Utara yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu instansi membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja tahun 2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, sekaligus merupakan Rencana Kerja sesuai dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja disusun berdasarkan usulan-usulan dari Kabupaten/Kota melalui forum perangkat daerah, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi dan pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang di input kedalam aplikasi SIPD. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang mengurus bidang Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud di atas untuk tahun 2026 melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden No 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang berisikan Pedoman dalam rangka memantapkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Government;
19. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 28. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024- 2026;
 29. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan proses pemetaan (*mapping*) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kegiatan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan sebagai upaya untuk mengakomodasi 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Tujuan ekonomi, yaitu mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Tujuan ekologis, yaitu melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

3. Tujuan sosial, yaitu memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
4. Tujuan administratif, yaitu meminimalkan adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga tercapai suatu keterpaduan dan berkelanjutan program.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3 **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**
- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

- 3.1 **Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD;
- 3.2 **Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja PD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD ;
- 3.3 **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, rencana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang terdapat didalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Pilihan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

tahun 2025-2029. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) tahunan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 menyajikan dasar pengukuran kinerja program/kegiatan yang berdasarkan sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026.

Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran terhadap Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Target produksi perikanan tangkap Sumatera Utara yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 sebesar 456.086,29 ton. Selama tahun 2024, realisasi produksi perikanan tangkap 391.128 ton atau 85,75% dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 sebesar 482.343,21, produksi perikanan tangkap tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 91.215,21 ton.

**TABEL 1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

No	Capaian Indikator	Target 2024	Realisasi	Persentase %
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	456.086,29	391.128	85,75

Penurunan jumlah produksi perikanan tangkap ini disebabkan karena beberapa faktor selama tahun 2021. Awal tahun 2021, masih adanya pandemi

covid 19 sehingga belum maksimalnya aktivitas perikanan, sehingga nelayan tidak melakukan aktifitas melaut karena adanya peraturan dari pemerintah dan kekhawatiran terjangkit Covid-19. Akibatnya, produksi perikanan tangkapan nelayan mengalami penurunan. Selain itu, harga ikan hasil tangkapan nelayan juga mengalami penurunan karena banyak restaurant yang tidak beroperasi selama covid-19. Harga ikan hasil tangkapan nelayan turun drastis mencapai 50 %. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan selama melaut untuk menangkap ikan. Selanjutnya penurunan produksi perikanan tangkap juga akibat dari adanya Peraturan dari Pusat yang menjadi kewenangan Provinsi.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan (kapal dan alat tangkap), peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

2.1.2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Target produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 sebesar 226.542,25 ton. Realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2024 sebesar 221.436 ton atau 97,74 % dari target yang ditetapkan.

**TABEL 2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

No	Capaian Indikator	Target 2024	Realisasi	Persentase %
1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	226.542,25	221.436	97,74

Bila dibandingkan produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 218.998 ton, produksi perikanan budidaya tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2.438 ton. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi capaian produksi tersebut yaitu, bantuan benih ikan dan benur udang kepada pembudidaya ikan dan udang serta pemberian bantuan pakan

ikan/udang kepada pelaku usaha budidaya ikan di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara. Dalam mengantisipasi harga pakan ikan yang melonjak karena produsen pakan ikan menaikkan harga disebabkan covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, maka Provinsi Sumatera Utara memberikan stimulus kepada pelaku usaha pembudidaya ikan dalam rangka pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

2.1.3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

**TABEL 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

No	Capaian Indikator	Target 2024	Realisasi	Persentase %
1	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	43.300	-	-
2	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m ²)	20.000	-	-
3	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	3	-	-

1. Pengembangan Mata Pencarian Alternatif Bagi Masyarakat Pesisir

Kegiatan Pengembangan Mata Pencarian Alternatif Bagi Masyarakat Pesisir merupakan kegiatan bagi para nelayan sebagai pencarian alternatif ketika nelayan tidak bisa melaut untuk menangkap ikan dengan cara budidaya ikan lele dengan menggunakan kolam terpal. Tahun 2022, kegiatan ini dilaksanakan di 2 kab/kota yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias Utara. Adapun bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa kolam terpal, 250 m², benih ikan lele 50.108 ekor dan pakan 3 ton.

2. Transplantasi Terumbu Karang

Kegiatan Transplantasi terumbu karang merupakan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kawasan terumbu karang kritis. Realisasi transplantasi terumbu karang seluas 1.079 m². Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Rehabilitasi Kawasan Kritis Mangrove

Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Kritis Mangrove bertujuan untuk mengurangi lahan kritis mangrove 10 ha. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 3 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Deli Serdang (3 ha), Kabupaten Langkat

(4 ha) dan Kabupaten Serdang Bedagai (3 ha) dengan pananaman 40 000 bibit tanaman rhizopus dan 4000 batang bambu ajir.

4. Sosialisasi Pengelolaan Kawasan konservasi.

Kegiatan Sosialisasi Kawasan konservasi bertujuan untuk mensosialisasikan penjelasan teknis bagaimana mengelola kawasan konservasi. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

5. Monitoring Kesehatan Karang.

Kegiatan Monitoring Kesehatan Karang telah dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan cara memonitoring terumbu karang yang ada didasar perairan oleh para tenaga ahli menyelam dengan memantau kesehatan karang, apakah tumbuh dengan baik atau terjadi kerusakan karang akibat pengeboman ikan atau penangkapan ikan.

2.1.4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

1. Operasional kapal pengawas perikanan di laut.

Operasi kapal pengawas perikanan di laut dilaksanakan sebanyak 12 kali di wilayah perairan laut Sumatera Utara. Realisasi kegiatan operasi kapal pengawasan di laut mencapai 100 % dengan anggaran Rp.516.155.700,-.

2. Operasional kapal perikanan di Danau Toba.

Operasional kapal perikanan di danau Toba telah dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota yang mengelilingi kawasan danau toba. Realisasi kegiatan ini mencapai 100% dan anggaran sebesar Rp.132.615.000,-.

3. Pemantauan dan fasilitasi penyelesaian konflik nelayan di Sumatera Utara

Kegiatan Pemantauan dan fasilitasi penyelesaian konflik nelayan di Sumatera Utara memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 1 kali pemantauan dari target sebesar 1 kali pemantauan.

4. Pengawasan Usaha Budidaya Ikan Air payau/tambak ikan Sumatera Utara dan udang di Sumatera Utara.

Kegiatan Pengawasan Usaha Budidaya Ikan Air payau/tambak ikan dan udang di Sumatera Utara memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100%

dengan realisasi kinerja pada 5 Kabupaten/Kota pemantauan dan persentase capaian anggaran sebesar 29.729.000,-.

2.1.5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

TABEL 4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

No	Capaian Indikator	Target 2024	Realisasi	Persentase %
1	Angka Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	49,74	49,74	100

Gencarnya pelaksanaan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di berbagai kab/kota se-Sumatera Utara terutama pada anak-anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak dalam pendidikan, upaya mengurangi stunting dan meningkatkan imun tubuh selama masa pandemi covid 19. Selain itu, beberapa kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang mendukung tercapainya angka konsumsi ikan masyarakat antara lain : kegiatan Hari Makan Ikan yang bekerja sama dengan dengan Start Up Aqua-Tech yaitu e-Fishery.

2.1.6. Pengarusutamaan Gender (PUG), Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP) System dalam perencanaan dan realisasi anggaran tahun 2024.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi. PUG merupakan strategi pembangunan yang diperlukan untuk

memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga bermanfaat untuk semua. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat serta semua elemen di tingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan. Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu analisis gender yang perlu dilakukan pada tahapan awal proses perencanaan dan penganggaran responsip gender. Proses ini merupakan bagian kunci dari pengarusutamaan gender (PUG). Untuk melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) diperlukan pemahaman baik pada tingkat konsep maupun implementatif oleh pemegang kebijakan maupun pelaksana program atau kegiatan. Oleh karena itu diperlukan pelatihan untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada mereka bagaimana PPRG dijalankan. Prinsip utama Perencanaan serta Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah adanya analisis gender terhadap setiap kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.1.7 Evaluasi Capaian Stunting Provinsi Sumatera Utara

Stunting adalah masalah kesehatan anak akibat gizi buruk yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak dan gangguan pertumbuhan pada anak dibawah umur lima tahun. Kondisi ini disebabkan oleh gizi buruk, terserang infeksi berkali-kali, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Namun, penyebab stunting yang paling banyak adalah karena kekurangan gizi. Pemerintah Provinsi Sumatera berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 2,2% di tahun 2023 menjadi 18,9%, dengan berbagai intervensi yang dilakukan. Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera menargetkan prevalensi stunting

di angka 14,5% tahun 2024. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan terus mempertajam (lebih tepat guna dan tepat sasaran) anggaran dan perbaikan data, lebih mempertajam anggaran untuk penurunan angka stunting, serta penggunaan teknologi untuk mendapat data yang akurat. Ada empat langkah strategis dalam upaya penurunan prevalensi angka stunting adalah pertama penggunaan satu data dan memanfaatkan teknologi, fokus kepada ibu hamil, mengaktifkan Posyandu, meningkatkan perhatian kepada baduta (bayi dua tahun), balita, sanitasi dan air bersih dan menyeleksi target intervensi bila terkendala masalah anggaran.

Dalam rangka penyelesaian masalah *Stunting* ini, maka Pemerintah Pusat dan Daerah menerapkan aksi konvergensi intervensi, yang terdiri dari delapan tahapan, antara lain:

- Aksi 1: Melakukan identifikasi sebaran *stunting*, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
- Aksi 2: Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
- Aksi 3: Menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat kabupaten/kota.
- Aksi 4: Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
- Aksi 5: Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
- Aksi 6: Meningkatkan sistem pengelolaan data *stunting* dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.
- Aksi 7: Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka *stunting* kabupaten/kota.
- Aksi 8: Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.

Tabel 5. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Stunting Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar Ikan)	407.032.985	Kegiatan dilaksanakan

Tabel T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	DINAS KELAUTAN PERIKANAN									
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan	80%	80%	80%	80%	98%	80 %	80%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	25%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	-	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	--

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	2 kegiatan	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	107 orang/bln	130 Orang / Bulan	128 Oran/bulan	128 Oran/bulan	100%	109 Orang / bulan	109 Orang / bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lamanya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lamanya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1KEGIATAN	1KEGIATAN	50%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penilaian barang milik daerah SKPD		100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang diinventarisasi		1 Paket	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		80%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	80%	1 Unit	1 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	50%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	20 Orang	10 Orang	15 orang	12 orang	80%	20 orang	20 orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Tahun)	6 Kegiatan	7 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	7 Kegiatan	7 Kegiatan	116%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Jumlah komponen Instalasi listrik yang disediakan	10 Paket	1 Paket 1 Unit	12 Paket	12 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	1%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 Paket	1 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	1%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	1 Paket				-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan; Jumlah bulan Penyediaan	5 Paket	1 Paket 12 Bulan				2 Paket	2 Paket	40%

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		konsumsi/makan minum rapat; Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Laporan	12 Laporan	600%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	30 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	6,66%
	Penata Arsip dinamis pada SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAAN ARSIP PADA SKPD	-	-	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	2 paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
	Pengadaan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah Pengadaan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	5 Unit	1 Paket	10 Unit	10unit	100%	20 Unit	13 Unit	260%
	Pengadaan SARANA DAN Prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan SARANA DAN Prasarana gedung Kantor atau	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		bangunan lainnya								
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung dan bangunan yang dibangun	-	1 Paket				-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Kegiatan	7 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	1 Kegiatan	33%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Jumlah Surat yang diadministrasikan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	33%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	25%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Kegiatan	4 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	8 Unit	80%	10 Unit	8 Unit	80%

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di rehab	-	1 Paket	10 Unit	10 unit	100%	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat dan Mesin yang diperbaiki	12 Unit	1 Paket				10 Unit	8 Unit	66%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1 Unit	5 unit	5 unit	100%	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	100 %	25 Ha	25 %	25 %	100%	27 %	25 %	25%
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3 Kegiatan	3 Laporan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	2 Kegiatan	66%
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final RZWP-3-K	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola; Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	210.403,53 Hektar	-	100 Hektar	100 Hektar	100%	44.000 Hektar	36.100 Hektar	0,17%

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi; Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	50 Hektar	3 Ha	100 Hektar	100 Hektar	100%	-	-	-
	Pengintergrasian Materi Teknis Peairan Pesisir / RZWP-3-K kedalam rencana tata ruang provinsi	Dokumen Pengintergrasian Materi Teknis Peairan Pesisir / RZWP-3-K kedalam rencana tata ruang provinsi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	1000 rekomendasi	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	1000 rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100%		-	-
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-		-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pengelolaan Perizinan Berusaha sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Sektor Kelautan Perikanan	-	-				1 Dokumen	1 Dokumen	-
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	399.941 Ton	482.343,21 Ton	2,53 %	456.086,29	456.086,29	461.559,33 Ton	-	-
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2 Kegiatan	2 Laporan	327 Unit 8 unit 34 Unit 16 Unit 13 Unit 6000 orang 80 modul	327 Unit 8 unit 34 Unit 16 Unit 13 Unit 6000 orang 80 modul	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	15 Unit	1 Unit	70 unit	70 unit	100%	25 Unit	25 Unit	166%
	Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	10 Unit	-				25 Unit	25 Unit	250%50%

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang di bina dan terfasilitasi	-	1 Kegiatan	327 unit	327 unit	100%	-	-	-
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	2 Laporan	5 Kegiatan 2631500 ekor 550 pcs 10 Unit	5 Kegiatan 2631500 ekor 550 pcs 10 Unit	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang di bina dan terfasilitasi	-	1 Kegiatan	-	-	-	25 Unit	25 Unit	-
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	1 Dokumen	3 Lokasi	3 Lokasi	100%	-	-	-
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	1 Dokumen	803 ekor	803 ekor	100%	-	-	-
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan	2 kegiatan	1 Lokasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Perikanan Provinsi	Perikanan Provinsi								
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	-	1 Lokasi	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2 Unit	1 Lokasi	1 Unit	1 Unit	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana; Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional (PPI)	5 Layanan	1 PPI	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	20%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan	165.325,35 Ton	218.998 Ton	226.542,25 ton	226.542,25 ton	100%	229.260,76 Ton	-	-
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	200 Rekomendasi	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100%	-	-	-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	-	200 Rekomendasi	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	100%	-	-	-
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	-	200 Rekomendasi	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	100%	-	-	-
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi PengelolaanPembudidayaan Ikan di Laut	3 Kegiatan	7 Laporan	1 Kegiatan 1000 ekor 1000 kg 5000 kg 2000 kg 1 tahun 2 KEGIATAN	1 Kegiatan 1000 ekor 1000 kg 5000 kg 2000 kg 1 tahun 2 KEGIATAN	100%	8 Kegiatan	4 Kegiatan	133%
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit) Jumlah Prasarana Operasional Unit Budidaya; Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan; Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	-	1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan; Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar	5 Unit	4 Pokdagan	-	-	-	-	-	-
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya; Jumlah Prasarana Operasional Unit Budidaya	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	-
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat; Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya; Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB; Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang	-	25 UPR 25 Unit 1 Dokumen	60 orang	60 orang	100%	-	-	-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Pembudidayaan Ikan; Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan								
	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Pembudidayaan yang mendapatkan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan	10 Unit	5 UPR	150 orang	150 orang	100%	7 Unit	7 Unit	70%
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan DI Perairan DARAT	Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan di perairan darat	1 Kegiatan	-	1.500.000 ekor 1000 ekor 300.000 ekor 200.000 ekor 1 paket 1 paket	1.500.000 ekor 1000 ekor 300.000 ekor 200.000 ekor 1 paket 1 paket	71%	1 Kegiatan	-	-
	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan atau manfaat atau dampak negtifnya Lintas daerah kab/kota	Jumlah Prasana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kab/kota	5 Unit	-	1 Unit	1 Unit	71%	1 Unit	1 Unit	20%
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	80%	3 Laporan	50%	50%	100%	50 %	25 %	31%

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3 Kegiatan	3 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33%
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai Kewenangan Provinsi	5 Pelaku Usaha	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20 Pelaku USaha	20 Pelaku USaha	400%
	Pengawasan Usaha Pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumah PELAKU USAHA PEMANFAAT SUMBER DAYA KELAUTAN YANG DI PERIKSA KEPATUHANNYA SESUAI KEWENANGAN PROVINSI (PELAKU USAHA)	5 PELAKU USAHA	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil; Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	-	2 Dokumen				-	-	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil; Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha	-	1 Dokumen				-	-	-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Penangkapan Ikan di Perairan Laut								
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Pokmaswas yang di bina	5 kelompok	41 kelompok	41 kElompok	41 kElompok	100%	12 Kelompok	12 Kelompok	24%
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	50 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	6 Pelaku Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum Daratan	5 Pelaku usaha	2 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	400%
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)	50,34 kg/kapital/tahun	51,32 Kg/Kap/Tahun	49,74 kg/kapital/tahun	51,24 kg/kap/tahun	100%	50,34 kgf/Kap/Tahun	-	-
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	10 Rekomendasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			-
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran danPengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	-	10 Rekomendasi	50 Rekomndasi	50 Rekomndasi	100%			-
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2 Kegiatan	2 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko; Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP	2 Kegiatan	5 unit usaha	6 unit usaha	6 unit usaha	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing; Jumlah Pendampingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2 Kegiatan	33 unit usaha	40 unit usaha	40 unit usaha	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50%

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	2 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	12 Lokasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	200%
	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Insentif yang diberikan pada pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Paket	5 UNIT USAHA	5 UNIT USAHA	100%	-	-	-

Program Kegiatan yang mendukung Pembangunan Gender pada Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 2.2 yaitu :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Kegiatan	Satuan	Volume	Pagu (Rp.)	Dukungan Langsung/ Tidak Langsung	Realisasi	
									Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya kegiatan olahraga yang responsif gender	Orang, kegiatan	153 orang, 12 kegiatan	53.850.000	Langsung	53.850.000	100
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bimtek Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan bagi Masyarakat di Perairan Umum Daerah	Orang	55 orang	200.000.000	Langsung	198.900.000	98,50
3.		Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Bantuan Premi Asuransi Nelayan	Orang	6.000 orang	1.200.600.000	Langsung	1.200.600.000	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai penjabaran visi, misi, sasaran, dan program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai penjabaran visi, misi, sasaran, dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa Urusan Kelautan dan Perikanan masuk kedalam Bidang Utama Intervensi Kawasan Prioritas Pembangunan Pengembangan Ekonomi Biru yang berfokus pada pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan termasuk sector perikanan, parawisata laut dan energi laut dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut.

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2024**

NO	Indikat or Kiner ja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan				Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8		9	10			11
1.	a. Produksi Perikanan (Ton)			634.701,24	655.242,20	676.399,89	682.628,54	647.654,92	667.517,20	701.341,21	612.564	Berkurang
	- Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			433.032,24	446.023,20	459.403,89	456.086,29	439.657,60	449.571,7	482.343,21	391.128	Berkurang
	- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			201.669	209.219	216.996,00	226.542,25	227.235,27	217.945,5	218.998	221.436	Berkurang
	b. Tingkat Konsumsi Ikan (Persen)			46,91	48,34	49,79	49,74	47,84	49,15	51,32	-	-
	c. Nilai Tukar Nelayan (Persen)			102	103	105	108,28	104,28	107	108,36	101,32	Berkurang
	d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Persen)			103	104	105	101	103,7	105,2	97,30	97	Berkurang
	e. Kawasan Konservasi Perairan (Hektar)			25.000	25.000	25.000	-	-	3.762,07	166.167,92	-	-
	f. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang (Hektar)			52.031	72.031	102.031	-	-	72.150	102.031	-	-
	g. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove			35	42	51	-	41	48	51	-	-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan. Perolehan data kinerja bersumber dari internal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang secara sistematis didasarkan pada laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit pelaksana dilingkungannya dan dari eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara seperti Badan Pusat Statistik.

Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya. Kedua data tersebut selanjutnya diolah dan dirangkum untuk disajikan.

Cara Pengukuran Kinerja (isi hasil realisasi 2024)

Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

2.3 Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan bagian integral dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Pada tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Program Kegiatan. Seluruh Program dan Kegiatan pada tahun 2024 dilaksanakan dengan baik. Realisasi anggaran menurut program-program tersebut seperti terlihat pada Tabel 5 (terlampir). Adapun dapat kami jelaskan bahwa realisasi anggaran yang utama adalah kegiatan kepada masyarakat (khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan masyarakat pesisir yang tertuang pada lima program).

Table 5. Realisasi Anggaran Tahun 2024 menurut Program Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.109.053.062	27.717.239.100	97,92
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	204.469.000	202.184.205	98,88
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9.965.470.796	9.885.121.308	99,19
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.952.456.101	9.277.037.874,43	93,21
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	774.991.471	767.360,700	99,01
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.0710.582.844	1.052.675.000	99,67
	TOTAL	52.019.793.462	51.258.504.846,67	98,54

Jumlah anggaran dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2024 dipandang cukup efektif dengan memberikan hasil yang baik. Hal ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk terus saling bekerja sama dan saling mendukung dalam kemajuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Utara pada tahun-tahun mendatang.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan urusannya, maka arah pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Arah pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 mengacu kepada pelaksanaan tahun pertama Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2025-2029. Rencana pembangunan kelautan dan perikanan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025–2029 ditujukan dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan daya saing, ketahanan pangan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2025– 2029 antara lain adalah :
 - A. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 1. Keterbatasan sarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mengakomodir luas wilayah perairan laut di WPP 571 Selat Malaka yang hanya memiliki 2 unit speed boat pengawas dan 1 unit kapal pengawas serta WPP 572

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

Samudera Hindia tidak memiliki kapal pengawas, untuk itu perlu dibentuk satuan kerja pengawasan di beberapa daerah Kabupaten/Kota beserta kelengkapan sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusianya;

2. Masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan nelayan modern terkait jalur penangkapan dan alat penangkap ikan serta masih banyaknya kapal perikanan yang tidak memiliki izin dan atau masih adanya kapal yang tidak sesuai dengan dokumen perizinannya dan tidak sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 18 tahun 2021, untuk itu perlu diperbanyak jumlah hari dalam melakukan patroli di laut;
3. Masih terjadi konflik antar nelayan dalam memperebukan daerah penangkapan ikan untuk alat tangkap yang berbeda di wilayah 0-4 Mil, hal ini diakibatkan kurangnya pengetahuan para nelayan tentang peraturan tentang perikanan untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan;

B. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun isu strategis dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara lain :

1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan merupakan isu yang sangat penting. Sebagai salah satu Pelabuhan Perikanan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam Strategi pengembangan kelautan dan perikanan yaitu Pembangunan Ekonomi Biru (Blue Economy). Hal ini sesuai dengan sesuai dengan KEPMEN KP RI Nomor 187 Tahun 2023 dimana Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan merupakan Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan

Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Persyaratan dalam Penarikan Pasca Produksi di zona 5 WPPNRI 571.

Namun Kondisi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan tanjung balai asahan saat ini masih jauh tertinggal dari pelabuhan perikanan lainnya yang ada di Sumatera Utara. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa pelabuhan perikanan tanjung balai asahan adalah salah satu pelabuhan perikanan di Pantai Timur milik Provinsi Sumatera Utara yang seharusnya menjadi tempat utama bagi para nelayan dan pekerja terkait perikanan melakukan aktivitas perikanan. Seperti kita ketahui sektor perikanan merupakan sektor yang memiliki potensi yang besar dan apabila dikelola dengan inovatif dan baik dapat memberikan manfaat dan membantu perekonomian Sumatera Utara khususnya Tanjung Balai Asahan yang merupakan penghasil ikan terbesar di Sumatera Utara. Untuk itu diharapkan peran nyata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan dan menjalankan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Salah satunya dengan mendukung Pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan, dimana akan terjadi kegiatan ekonomi yang membawa dampak bagi pemerintah provinsi sumatera utara sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan tanjung balai asahan yang mayoritas penduduk nya bermatapencaharian sebagai nelayan.

Maka oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi kepelabuhanan dan fungsi perusahaan sesuai dengan PP 27 Tahun 2021 Pasal 184 dalam mendukung PIT dimana pelabuhan perikanan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah sumatera utara khususnya pantai timur sumatera utara, maka sangat diperlukan Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan di pelabuhan perikanan tanjung balai asahan. Adapun

pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan yang harus ada pada Pelabuhan Perikanan sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 memiliki fasilitas berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional, dan Fasilitas Penunjang. Dimana saat ini Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai hanya memiliki fasilitas yang paling minimal untuk sebuah pelabuhan perikanan sehingga sampai saat berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional pelabuhan perikanan tanjung balai asahan masih termasuk Pelabuhan Kelas D. Dan berdasarkan data statistik tahun 2023 Jumlah Kapal di Tanjung Balai dan Asahan sebanyak 4.343 Kapal, dengan Jumlah Nelayan sebanyak 7.963 Orang. Hal ini merupakan suatu potensi yang sangat besar jika kegiatan perikanan, tambat labuh dan bongkar muat di lakukan di Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan. Oleh karena itu, untuk memberikan dampak positif terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat terutama dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat disekitar tanjung balai asahan, Pelabuhan perikanan tanjung balai harus meningkatkan Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang agar menjadi Pelabuhan Kelas C. Sehingga kegiatan perikanan dapat terkelola dengan baik yang dapat mencegah, menghalangi dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal dan tidak dilaporkan. Adapun Pengembangan Fasilitas berkelanjutan yang direncanakan dengan total anggaran Rp 38.000.000.000,- sebagai berikut:

a) Fasilitas Pokok.

1) Perpanjangan Dermaga.

Dimana untuk kondisi saat ini, dermaga existing di pelabuhan perikanan tanjung balai asahan hanya sepanjang 60 Meter dan sudah mengalami penurunan fungsinya sebesar 40% dan dapat berisiko ambruk/ rubuh

jika tidak segera dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, perbaikan dermaga diharapkan segera dapat dilakukan agar menghindari terjadinya risiko ketika nelayan melakukan aktifitas perikanan di dermaga pelabuhan tersebut. Selain perbaikan, Perpanjangan dermaga sepanjang 500 meter yang direncanakan dibangun secara bertahap dan berkelanjutan. Dimana pada tahapan pertama perpanjangan dermaga direncanakan sepanjang 250 Meter. Perpanjangan dermaga ini menjadi prioritas karena merupakan salah satu kriteria teknis dalam peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Serta dengan melihat potensi yang ada, jika dikelola dan terpusat di pelabuhan perikanan tanjung balai asahan dapat memberikan dampak dan implikasi terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2) Kolam pelabuhan.

Untuk mendapatkan fungsi yang optimal dan ideal kedalaman kolam dan luas kolam pelabuhan juga menjadi perhatian utama, karena Luas kolam pelabuhan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran kapal yang akan berlabuh. Untuk mendukung peningkatan kelas pelabuhan, maka kedalaman kolam pelabuhan paling dangkal Minus 2 Meter.

Adapun Luas kolam Pelabuhan di UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan seluas 2.250 m².

3) Jalan Lingkungan Pelabuhan.

Pengembangan Jalan lingkungan Pelabuhan perikanan tanjung balai asahan harus dilakukan agar memperlancar jalannya aktivitas operasional pelabuhan dengan minimal lebar jalan 8 Meter. Kondisi jalan lingkungan juga harus dengan kondisi yang baik, bersih, nyaman dan memiliki

ruang terbuka hijau agar dapat mewujudkan pelabuhan berwawasan lingkungan yang sejalan dengan konsep ekonomi biru. Kondisi Jalan Pelabuhan di UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan saat ini adalah seluas 90x8 m².

b) Fasilitas Fungsional.

1) Bengkel perikanan modern

Pengembangan bengkel perikanan yang modern dan berteknologi terkini merupakan fasilitas fungsional yang harus dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan sehingga mampu menghasilkan pelayanan perbengkelan yang bermutu, produktivitas tinggi dan efisien.

2) Pabrik es dan Cold Storage tenaga surya

Perluasan Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk Kegiatan Perikanan sangat diperlukan, salah satunya pemanfaatan energi tenaga surya. Wilayah Indonesia yang berada di garis equator memberikan keuntungan antara lain intensitas penyinaran cahaya matahari yang berpotensi membangkitkan energi Listrik. Sehingga pengembangan pabrik es dan cold storage bertenaga surya mendukung ketahanan energi, Penghematan pengeluaran biaya dan menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan berkelanjutan khususnya Masyarakat nelayan.

3) Air Bersih dan Sanitasi Modern

Pengembangan pelabuhan perikanan tanjung balai asahan juga harus memperhatikan dampak lingkungan hidup. Masalah pencemaran lingkungan di pelabuhan dapat terjadi karena keterbatasan fasilitas kebersihan, sedikitnya peraturan dan

rendahnya kesadaran dan kepedulian pengguna pelabuhan terhadap kebersihan lingkungan. Untuk itu perlunya pengembangan fasilitas air bersih dan sanitasi modern untuk menjaga higienitas dan kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan.

c) Pembangunan Fasilitas Penunjang

- Fasilitas sosial dan umum berupa klinik kesehatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengembangan klinik kesehatan di pelabuhan perikanan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada nelayan yang termasuk dalam kategori pekerjaan dengan risiko tingkat tinggi ketika melaut. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lengkap di pelabuhan, dan apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat nelayan melaut, nelayan tersebut bisa segera mendapatkan penanganan yang cepat, sehingga meminimalisir resiko terjadinya kondisi yang lebih fatal.

Dermaga yang ada saat ini masih seluas 60x6 m². Dengan Panjang dermaga ± 78 meter. Kondisi dermaga saat ini masih dapat digunakan, namun sudah mengalami penurunan fungsi sebesar 40%. Sehingga Aktivitas bongkar muat kapal-kapal ikan hanya dilakukan oleh Kapal Ikan dibawah 30 GT, sedangkan kapal-kapal diatas 30 GT melakukan aktivitas bongkar muat ditangkahan/ Gudang yang ada disekitar Tanjung Balai Asahan.

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 164-TIB/2000, lokasi Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada awalnya dengan luas areal ± 34.100 m². Namun

Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 Tahun 2013 dari Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan bahwa luas untuk dan atas nama Pemkab Asahan cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara seluas 10.787 m³. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Matrix Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Urusan Perikanan Tangkap - Penetapan lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi adalah wewenang Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi secara administratif dengan Pemkab Asahan dalam hal pelepasan tanah lokasi PPI Tersebut. Sampai dengan tahun 2023 telah banyak dilakukan pembangunan sarana dan prasarana di lokasi PPI tersebut yang tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung program Penangkapan Ikan Terukur dan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Pasca Produksi.

Pengembangan Pelabuhan ini sangat penting untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Meningkatkan Nilai Konsumsi Ikan untuk penurunan angka stunting serta Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Sumatera Utara. Karena Nelayan merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap segala jenis situasi kemiskinan. Penghidupan keluarga nelayan rentan terhadap ketidakpastian dan sering dicirikan sebagai penduduk dalam sektor miskin dalam masyarakat. Beberapa faktor yang merupakan sumber kerentanan nelayan diantaranya adalah sumberdaya yang terbatas, keterbatasan teknologi penangkapan, perubahan iklim, persaingan harga ikan minimnya faktor permodalan dan faktor sosial ekonomi. Dengan teknologi yang terbatas, maka

ketergantungan terhadap musim menjadi sangat tinggi, dan wilayah tangkapnya juga terbatas. Akibatnya hasil tangkapan juga terbatas. Ketidakpastian mata pencaharian maupun perubahan pendapatan yang dihadapi nelayan menyebabkan keluarga nelayan merasakan tekanan ekonomi. Kerentanan sosial ekonomi keluarga nelayan yang tinggi terlihat dari besarnya beban yang dimiliki, dan hal tersebut berdampak terhadap menurunnya kesejahteraan nelayan. Padahal seperti kita ketahui Sektor perikanan mempunyai peran dalam menunjang perkembangan perekonomian nasional. Namun masih belum berdampak signifikan terhadap kehidupan nelayan. Oleh karena itu dengan adanya pengembangan pelabuhan perikanan di provinsi Sumatera utara sangat diharapkan dapat memberikan dampak kepada Masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, menaikkan taraf hidup nelayan agar mampu bersaing, mampu memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan aktivitas perikanan, mendapatkan kemudahan akses permodalan dalam meningkatkan usaha perikanan sehingga meningkatkan pendapatan Masyarakat Nelayan Sumatera utara.

Selain itu, dalam pengembangan pelabuhan perikanan juga harus memperhatikan dampak lingkungan hidup bagi masyarakat disekitar pelabuhan perikanan. Dengan tingginya aktivitas perikanan yang terjadi dipelabuhan perikanan tentunya pencemaran lingkungan bisa terjadi apabila penanganan terhadap kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan tidak dilaksanakan dengan baik. Pengembangan Penerapan sanitasi lingkungan di pelabuhan perikanan salah satu yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang higienis dan bersih sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Selain itu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, melaksanakan program kerja bersama pengguna

pelabuhan, penerapan peraturan dengan sanksi yang tegas, pengawasan ketat terhadap lingkungan pelabuhan, sosialisasi kepada pengguna pelabuhan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian pengguna pelabuhan perikanan dalam menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan yang memiliki fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang yang memadai tentunya berdampak terhadap perputaran roda ekonomi sektor perikanan di wilayah provinsi Sumatera utara khususnya kepada nelayan dan masyarakat sekitar pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Sehingga ketika masyarakat mendapatkan pelayanan jasa yang disediakan pelabuhan perikanan, Pemerintah Provinsi bisa menjalankan retribusi/ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pelabuhan Perikanan. Dan hal ini dipastikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Retribusi Jasa Kepelabuhan secara signifikan dan berkelanjutan.

Produksi di UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan terdiri dari Hasil tangkapan ikan dan kerang. Hasil tangkapan Kerang pada tahun 2022 sebesar 240.000 Kg. Sedangkan hasil Tangkapan Ikan Tahun 2022 UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan berdasarkan (STBLKK/SLO/SPB) sebesar 22.463.760 Kg. Dengan rincian sebagai berikut:

HASIL TANGKAPAN TAHUN 2022 PP TANJUNG BALAI ASAHAN (SLO/SPB)													
NO.	JENIS TANGKAPAN	JUMLAH (kg)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	Bawal	3.300	1.990	2.050	750	2.210	1.990	5.720	3.100	2.080	2.340	4.900	5.034
2	Beloso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Cencaru	134.213	68.877	54.931	80.820	99.687	90.508	85.220	87.254	98.492	118.194	107.260	57.920
4	Ciliap	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cucut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cumi-Cumi	104.154	94.886	84.269	97.139	91.059	121.355	144.952	143.378	153.819	174.710	171.294	138.560
7	Gulamah	90.049	90.440	88.260	83.220	85.210	108.640	114.960	108.170	108.680	144.680	96.120	99.120
8	Ikan Asin	-	-	-	-	25.935	12.210	2.878	23.622	3.807	24.365	-	-
9	Ikan Campur	74.643	314.994	124.486	121.870	208.736	164.940	125.220	161.150	170.240	130.300	3.116	77.700
10	Ikan Talang	2.030	42.500	431	2.400	21.110	4.346	-	16.403	-	11.000	15.700	3.223
11	Jenaha	7.170	6.840	6.800	9.410	7.750	7.620	11.830	5.510	4.070	6.580	5.926	7.770
12	Kakap	-	-	-	200	150	1.800	450	850	750	700	900	2.220
13	Kecepeh	87.680	48.700	79.190	77.950	60.500	56.710	63.650	54.900	58.900	66.350	60.300	56.050
14	Kembung	106.373	115.754	114.761	161.722	98.146	157.446	130.493	137.255	179.754	143.633	143.389	80.619
15	Kerapu	-	-	-	-	150	-	-	-	-	5.000	405	800
16	Kotip-Kotip	-	-	15.000	-	7.100	500	50	-	-	-	-	-
17	Layang	101.888	987.555	251.923	518.968	646.462	896.912	589.326	1.109.303	836.280	940.846	189.160	186.360
18	Layur	5.642	5.367	5.525	2.773	4.916	2.630	4.662	9.750	5.275	4.789	5.810	57.139
19	Malong	6.180	5.650	5.321	14.270	12.970	15.800	21.302	16.940	-	13.520	13.300	11.565
20	Mayung	-	-	-	7.849	600	-	-	-	-	-	-	-
21	Moa	4.789	4.811	1.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pekco	-	-	-	-	130	130	-	200	300	150	-	940
24	Pertakus	-	2.300	3.340	240	300	2.100	200	400	300	3.896	900	6.620
25	Puput	181	300	3.220	450	330	549	-	-	650	-	-	1.711
26	Rajungan	-	-	588	-	-	-	-	-	900	1.100	3.899	2.120
27	Sekpo	63.490	72.535	71.490	87.190	82.810	73.380	90.580	94.460	92.020	83.350	78.760	68.720
28	Selar	139.072	107.938	81.565	21.694	145.172	58.126	37.500	115.737	60.700	66.755	49.496	45.268
29	Senangin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Senohong	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-
31	Sotong	17.100	20.550	22.400	-	21.600	-	-	-	-	-	-	-
32	Tembang	23.017	69.399	16.511	60.205	93.042	74.449	48.338	72.155	48.879	57.562	25.484	29.475
33	Tenggiri	410	400	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
34	Teri	44.563	62.029	60.109	97.050	60.305	72.260	97.100	79.610	85.730	89.740	76.260	74.180
35	Terisi	3.657	2.716	4.347	1.568	2.440	3.936	2.418	2.129	4.326	2.901	3.185	3.366
36	Tongkol	48.806	256.292	81.049	163.546	260.033	212.732	143.247	169.150	132.203	164.606	85.646	77.725
37	Udang	107.850	125.955	154.095	38.830	197.795	102.220	125.760	114.440	131.519	115.860	110.900	101.278
TOTAL (kg)		1.176.257	2.508.778	1.332.897	1.650.514	2.236.948	2.243.589	1.845.856	2.516.116	2.184.149	2.373.413	1.251.089	1.144.154
													22.463.760

3. Penangkapan Ikan.

- Kapal ikan menangkap ikan tanpa dokumen yang sah, seperti;
 - Tanpa IUP/SIPI, atau telah habis masa berlakunya,
 - Surat ijin tidak sesuai dengan kondisi kapal yang sebenarnya, seperti: penangkapan ikan dengan alat terlarang dan Pelanggaran jalur penangkapan ikan
- Terjadinya pencemaran di perairan umum dan pantai;
- Terjadi kesenjangan pemanfaatan SDI di perairan Sumatera Utara antara pantai barat dan pantai timur;
- Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM dan oli;
- Jumlah kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap tradisional dengan produksi yang masih rendah;
- Produksi perikanan masih didominasi oleh hasil tangkapan di laut;
- Daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang terbatas;
- Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang penangkapan ikan masih terbatas;

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

9. Rendahnya mutu hasil tangkapan ikan nelayan yang berakibat kepada rendahnya harga jual ikan;
 10. Terbatasnya bahan baku kayu sebagai bahan pembuatan kapal perikanan.
- c. Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan.
1. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang belum memperhatikan standar kesehatan;
 2. Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan masih terbatas;
 3. Tingkat pendidikan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan masih rendah;
 4. Belum semua parameter uji untuk pengujian produk hasil perikanan terakreditasi;
 5. Jenis peralatan uji di UPTD. PMHP belum lengkap;
 6. Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor hasil perikanan Sumatera Utara;
 7. Ketersediaan bahan baku untuk UPI yang melakukan kegiatan ekspor hasil perikanan masih terbatas;
 8. Belum semua UPI dan supplier memiliki Serifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 9. Mutu hasil perikanan yang di ekspor oleh UPI belum sesuai dengan permintaan pembeli luar negeri;
 10. Pengelolaan usaha penangkapan ikan oleh sebagian besar pelaku usaha belum dilandasi dengan kaidah-kaidah pengelolaan usaha yang baik;
- d. Budidaya Perikanan.
1. Meningkatnya harga pakan sehingga meningkatkan biaya produksi;
 2. Belum tuntasnya penanganan penyakit ikan, khususnya pada pembudidayaan udang;

3. Belum optimalnya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); Terbatasnya akses permodalan;
 4. Penyakit ikan dan udang.
 5. dapat diidentifikasi sebagai berikut:
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara.
 - a. Meningkatnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan khususnya nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pedagang hasil perikanan di Sumatera Utara
 - b. Meningkatnya ekspor hasil perikanan di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan devisa
 - c. Meningkatnya konsumsi ikan di Provinsi Sumatera Utara
 - d. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara
 4. Peluang dan tantangan pelayanan OPD Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
 - a. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir
 - Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir
 - b. Pengembangan pesisir dan pulau-pulau terluar.
 - Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan, pengolah dan pedagang hasil perikanan serta pembudidaya ikan tradisional di kawasan pesisir

- Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.
 - Memelihara kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan beserta ekosistemnya.
- c. Pengembangan usaha hasil perikanan.
- Mengembangkan usaha hasil perikanan yang mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, nilai tambah bagi masyarakat nelayan khususnya di pedesaan, mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - Diversifikasi hasil olahan perikanan
 - Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan
 - Penerapan rantai dingin.
- d. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat.
- Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang Kelautan dan Perikanan
 - Menjadikan laut sebagai perekat kesatuan dan persatuan NKRI.
- e. Pengembangan budidaya perikanan
- Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan
 - Menyediakan induk dan benih unggul
 - Pencegahan hama penyakit dan ikan
 - Restocking perairan umum
 - Pembangunan /perbaikan dempon
 - Pembangunan/perbaikan saluran irigasi
- f. Pengembangan perikanan tangkap
- Meningkatkan pendapatan nelayan
 - Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan
 - Pembangunan /rehabilitasi Pelabuhan perikanan
 - Pembangunan /rehabilitasi Pangkalan pendaratan Ikan

- Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan lainnya
- Pemberdayaan nelayan skala kecil
- g. Pengembangan perikanan, kelautan, masyarakat pesisir sebagai berikut :
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - Meningkatkan nilai riil sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perikanan dan peningkatan peranan produk dan jasa maritim dan kelautan.
 - Meningkatkan pemantapan status kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - Meningkatkan peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir, laut dan perairan umum.
 - Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang Kelautan dan Perikanan.
 - Meningkatkan pengendalian sumberdaya perikanan

2.5. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2026, beberapa usulan yang diajukan dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan.

Analisis kebutuhan kemudian dilakukan terhadap estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya baik jumlah program/kegiatan/sub kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan. Pada tahun 2025 telah ditetapkan 17 (tujuh belas) Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dimana Bidang

Kelautan dan Perikanan masuk dalam Pengembangan Ekonomi Biru yang menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. Program Prioritas ini bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam ekonomi daerah melalui dua jalur utama diantaranya melalui ekonomi biru yang difokuskan pada optimalisasi potensi kelautan dan perikanan, yang merupakan sector strategis.

Pembangunan pelabuhan perikanan di tiga wilayah pesisir yaitu di Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, dan Tanjung Balai ditujukan untuk memperkuat infrastruktur logistik hasil laut, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan efisiensi pemasaran hasil perikanan. Di sisi pemberdayaan nelayan, pemerintah menyediakan kapal dan alat tangkap ramah lingkungan di tujuh kabupaten/kota, yang bertujuan meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan

sumber daya laut. Penguatan rantai dingin perikanan dilakukan melalui pembangunan cold storage bertenaga energi baru dan terbarukan (EBT), seperti tenaga surya, yang mampu menjaga mutu hasil tangkapan dan memperpanjang umur simpan produk. Selain itu, pelatihan pengolahan hasil laut serta pemberian bantuan peralatan untuk usaha budidaya ikan menjadi strategi dalam meningkatkan nilai tambah produk kelautan. Sumatera Utara juga mendorong pengembangan energi laut dan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di lima lokasi, yang bertujuan memperkuat infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi pesisir.

Terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang mendukung prioritas pembangunan nomor 6 (enam) yang menunjukkan sinergi yang kuat dengan arah kebijakan Nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				42.891.594.102,-					42.891.594.102,-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	27.485.345.115 ,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	27.485.345.115 ,-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	8 Dokumen	22,700,000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkaDaerah	Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	8 Dokumen	22,700,000,-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 org/bln	20,034,738,000,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 org/bln	20,034,738,000,-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas KP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	64,920,000,-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas KP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	64,920,000,-	

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Provsu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	52 kali	36,400,000,-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Provsu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	52 kali	36,400,000,-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas KP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Org	251,855,000,-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas KP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Org	251,855,000,-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas KP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46,560,500,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas KP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46,560,500,-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas KP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	127,162,089,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas KP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	127,099,689,-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas KP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	61,880,800,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas KP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	63,883,772,-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas KP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	150.000.000,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas KP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	120,787,300,-	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 kali	437,000,000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 kali	437,000,000,-	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas KP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	8,160,000,-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas KP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	8,160,000,-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	31,225,000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	31,225,000,-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	472,300,000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	472,300,000,-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,327,485,554,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,327,485,554,-	

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas KP	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak	10 Unit	320,830,300,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas KP	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak	10 Unit	320,830,300,-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provsu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	119,400,000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provsu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	119,400,000,-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	257.805.670,44,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	257.805.670,44,-	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1000 Ha	699.746.210,-	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1000 Ha	699.746.210,-	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	44000 Ha	199,998,000,-	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	44000 Ha	199,998,000,-	
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	50 Ha	249,765,510,-	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	50 Ha	249,765,510,-	
Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	1 Dokumen	100,000,000,-	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	1 Dokumen	100,000,000,-	
Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	50.000.000,-	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	50.000.000,-	

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan dan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Peisisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	99,982,700	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	99,982,700	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Provsu	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	461.559,3 Ton	6.998.580.000,-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Provsu	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	461.559,3 Ton	6.998.580.000,-	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25 Unit	4.695.080.000,-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25 Unit	4.695.080.000,-	
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25 Unit	2.303.500.000,-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25 Unit	2.303.500.000,-	

RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Provsu	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	229.260,8 Ton	3,999,999,988,-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Provsu	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	229.260,8 Ton	3,999,999,988,-	
Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	7 Unit	3,999,999,988,-	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	7 Unit	3,999,999,988,-	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Provsu	Persentase Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang diawasi	98%	750.077.650,-	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Provsu	Persentase Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang diawasi	98%	750.077.650,-	
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	399,997,300,-	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	399,997,300,-	

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	78,488,000,-	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	78,488,000,-	
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	12 Kelompok Masyarakat	121,592,000,-	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	12 Kelompok Masyarakat	121,592,000,-	
Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	100,000,250,-	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	100,000,250,-	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	50,000,100,-	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	50,000,100,-	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Provsu	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	98%	499.906.588,-	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Provsu	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	98%	499.906.588,-	
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk				49,980,000,-					49,980,000,-	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing										
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	149,941,100,-	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	149,941,100,-	
Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	10 Unit Usaha	299,985,488,-	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	10 Unit Usaha	299,985,488,-	
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan				499.994.648					499.994.648	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	176,415,000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	176,415,000,-	
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan	101,186,358,-	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan	101,186,358,-	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan	Semua Kota/Kab, Semua	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa	1 Kegiatan	222,393,290,-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan	Semua Kota/Kab, Semua	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa	1 Kegiatan	222,393,290,-	

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kecamatan, Semua Kel/Desa	pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko			Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kecamatan, Semua Kel/Desa	pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko			
UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello				400.000.000,-					400.000.000,-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Kel/Desa					Kel/Desa				
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				350,000,000					350,000,000	
UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai - Asahan				600.165.943,-					600.165.943,-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	185,980,000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	185,980,000,-	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	414,185,943,-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	414,185,943,-	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut				699.972.289,-					699.972.289,-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	180,000,000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	180,000,000,-	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	184,600,000,-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	184,600,000,-	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	235,272,289,-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	235,272,289,-	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Kel/Desa					Kel/Desa				
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	100,100,000,-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	100,100,000,-	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Sebagaimana fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang utama yaitu penyelenggaraan perumusan kebijakan perikanan tangkap, budidaya, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkupnya, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Tingkat Provinsi serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan. Namun, dari usulan-usulan aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang, maka aspirasi tersebut diserap kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan skala prioritas yang juga disesuaikan dengan kemampuan atau besaran pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran, sehingga pengusulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akan menyesuaikan dengan anggaran

dan usulan serta kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan usulan dari para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat di **Lampiran Tabel T-C.32**.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam konsep Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029, agenda pembangunan Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia terutama pada perikanan dan EBT berbasis kelautan sebagai sumber pertumbuhan baru dengan kerangka Regulasi Legalisasi Indonesia Blue Economy Roadmap sebagai turunan dari amanat RPJPN 2025-2045, Penguatan Regulasi IUU Fishing dan perikanan berbasis kuota dan Legalisasi pengklasifikasian Blue Taxonomy. Dalam Rancangan Awal RKP 2025, KKP masuk ke dalam 2 (dua) dari delapan Asta Cita yaitu:

Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dengan 3 kelompok program kerja yaitu: a) swasembada pangan, b) ekonomi biru, dan c) sistem pertahanan dan keamanan Negara;

Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama pada kelompok program kerja: pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Konsep Blue Economy ini dikembangkan untuk mendorong peningkatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi pro lingkungan melalui pengembangan bisnis dan investasi yang inovatif dan kreatif. Cara pandang ekonomi tersebut, merupakan cara untuk mengembangkan ekonomi yang mengandalkan sumber daya kelautan yang secara menyeluruh yang dikaitkan dengan manajemen

kesinambungan dan pelestarian aset untuk menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait. Sedangkan esensi dari cara pandang ekonomi itu terletak pada inovasi dan kreativitas dalam berbisnis, termasuk di dalamnya diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi, financial engeneering, dan menciptakan pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan.

Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia mensinergikan konsep blue economy sebagai kerangka kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang tengah berjalan yakni industrialisasi kelautan dan perikanan. Didalam percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dibutuhkan, modernisasi, peningkatan nilai tambah, dan daya saing. Blue Economy merupakan sebuah model ekonomi baru dengan menggunakan logic of ecosystem di dalam menjalankan pembangunan kelautan dan perikanan. Pada dasarnya, Blue Economy bukanlah ekonomi yang bersandarkan pada kelautan semata, akan tetapi dapat memberikan jaminan bahwa suatu pembangunan yang dijalankan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjamin terjadinya keberlanjutan, terutama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan tidak merusak lingkungan, namun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Blue Economy menitikberatkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang diarahkan untuk mencapai lima sasaran besar, yaitu efisiensi kekayaan alam (natural resources efficiency), tanpa limbah (zero waste), social inclusiveness, keseimbangan antara produksi dan dan konsumsi (Cyclic systems of production: endless generation to regeneration, balancing production and consumption), inovasi dan adaptasi (Open-ended innovation and adaptation).

Telaahan kebijakan Pembangunan Nasional dan kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Tema RKPD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2026 yaitu: “**Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara**” dimana tema pembangunan tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.. Berdasarkan tema pembangunan tersebut ditetapkan prioritas pembangunan Tahun 2026 sebagai berikut :

- 1). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2). Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
- 3). Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
- 4). Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Kebijakan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi OPD maupun lintas OPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi Pembangunan Daerah Gubernur terpilih sesuai visi dan misinya juga mengacu pada agenda Pembangunan Nasional (RJPM Nasional) dan Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Perencanaan Daerah Sumatera Utara). Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 dalam tahap penyusunan yang disesuaikan dengan RKPD tahun 2026.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Utara pada tahun 2026 meliputi:

1. Peningkatan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk.
2. Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri.
3. Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

4. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
5. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.
6. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

3.2.1 Tujuan

Tujuan dalam Rencana Kerja ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029. Tujuan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Untuk menjabarkan dan mengimplementasikan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari Tahun 2025-2029 maka yang menjadi tujuan lainnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir.
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.
- c. Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.
- d. Mendorong pertumbuhan industri dan ekspor hasil perikanan.
- e. Mendorong dan meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif.
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perikanan

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran. Sasaran dari Ranwal Renja tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, kebijakan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam operasionalnya sesuai dengan Ranwal Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi Kelautan dan Perikanan dengan program yang berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam rangka mengembangkan kesempatan berusaha, dan kesempatan kerja, peningkatan devisa melalui ekspor hasil perikanan dan peningkatan PAD.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Pesisir dan laut serta Pulau-Pulau kecil.
4. Meningkatkan sistem pelayanan melalui pengembangan fasilitas (sarana/prasarana) dalam upaya mengoptimalkan produk kelautan.
5. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Program Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya .
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

- Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana usaha ekonomi bagi masyarakat pesisir; pengelolaan kawasan konservasi melalui penenggelaman Terumbu Karang Buatan/TKB, penanaman bibit mangrove, serta cemara laut; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat.
- Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3.3.2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Pembuatan Dokumen Master Plan Perikanan Budidaya
- Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan IV-60 | Ranwal RPJMD 2025-2029 yang Baik) dan CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi sarana prasarana loka budidaya; dan penanganan hama penyakit ikan
- Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan

- Pembangunan Model Budidaya Ikan
- Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan Budidaya yang ramah lingkungan
- Pemberian bantuan sarana prasarana produksi perikanan Budidaya Ikan kepada Kabupaten/Kota
- Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan perikanan
- Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan air payau dan laut.
- Menyediakan induk dan benih unggul serta pakan ikan.
- Pencegahan hama dan penyakit ikan.

3.3.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan sarana prasarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.
- Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan melalui pembuatan Masterplan Pelabuhan Perikanan
- Pembuatan Dokumen Master Plan Kawasan Nelayan Berkah
- Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan Tangkap yang ramah lingkungan
- Pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap kepada kelompok nelayan di Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kualitas, Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan dengan Tetap Menjaga Ekosistem Laut
- Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan perikanan
- Penguatan Logistik dan Sarana Pengisian Bahan Bakar Nelayan
- Meningkatkan pendapatan nelayan.
- Meningkatkan produksi perikanan di laut dan perairan umum.
- Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui asuransi nelayan yang diharapkan pada tahun 2026 akan mengcover 6100 orang nelayan sehingga resiko kecelakaan nelayan saat melaksanakan usaha penangkapan semakin kecil.
- Melakukan pemulihan sumberdaya ikan dengan penebaran benih di perairan umum daratan (sungai, danau, waduk dan laut).

3.3.4 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan Angka Konsumsi Ikan di Sumatera Utara melalui Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) melalui kerjasama dengan Stakeholder, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), rekomendasi SNI dan sertifikat hasil uji (CAT/Certificate Of Analysis), diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan, penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi e-commerce.
- Pembangunan Hilirisasi Pengolahan Ikan

- Memberikan bantuan sarana prasarana sebagai wadah hilirisasi pengolahan ikan di Kabupaten/ Kota
- Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.
- Diversifikasi hasil olahan perikanan
- Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan
- Penerapan system rantai dingin

3.3.5 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).
- Meningkatnya pengawasan dalam produksi perikanan
- Terwujudnya penegakan hukum di laut
- Terselenggaranya pengawasan sumberdaya laut
- Meningkatnya kesadaran nelayan dalam mematuhi aturan yang berlaku

Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk pelaksanaan: 1. Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut. 2. Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing. 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

	perikanan	
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan

3.3.6. Tabel Rencana Program Kegiatan Tahun 2026 dan Rencana Maju Tahun 2027

Renja tahun 2026 telah menyusun Tabel yang dilengkapi dengan kebutuhan anggaran tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 (terlampir).

Berikut adalah beberapa cara nelayan berkontribusi terhadap perekonomian antara lain :

1. Pendapatan dan Kesejahteraan

Nelayan menciptakan pendapatan bagi dirimereka sendiri dan keluarga mereka melalui penjualan hasil tangkapan mereka. Pendapatan ini mengalir kedalam ekonomi lokal, mendukung bisnis-bisnis lain seperti pengecer ikan, produsen peralatan nelayan,dan pasar lokal.

2. Penciptaan Lapangan Kerja

Industri perikanan menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Selain nelayan sendiri, ada pekerjaan lain yang terkait dengan industri ini seperti pemrosesan ikan, distribusi, transportasi dan penjualan.

3. Ekspor dan Devisa

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

Negara-negara yang memiliki industri perikanan yang kuat dapat menghasilkan devisa yang signifikan melalui ekspor hasil tangkapan ikan.

4. Kontribusi terhadap PDB

Sektor perikanan, termasuk pekerjaan nelayan, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Ini mencakup nilai dari tangkapan ikan, pemrosesan, pendistribusian, dan berbagai kegiatan terkait.

5. Pengembangan Daerah Pesisir

Industri perikanan pada daerah pesisir dapat menghasilkan investasi dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan perikanan.

6. Pemeliharaan Budaya dan Tradisi

Nelayan adalah penjaga tradisi dan budaya lokal terkait dengan kehidupandi laut atau sungai. Mereka mewariskan pengetahuan dan keterampilan mereka dari generasi ke generasi, yang memainkan peran penting dalam identitas budaya suatu daerah, khususnya pada daerah pantai timur dan pantai barat Provinsi Sumatera Utara.

Implementasi Program dipusatkan kepada Kawasan Kampung Nelayan dan Kawasan Kampung Budidaya Ikan yang terdiri atas :

1. Kawasan Kampung Nelayan

Suatu lingkungan pemukiman masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dengan mata pencarian penangkapan ikan diperairan laut atau perairan darat. Pemberdayaan Kawasan Kampung Nelayan memiliki beberapa manfaat yang signifikan tidak hanya bagi para nelayan itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya pemberdayaan Kawasan kampung nelayan dilaksanakan antara lain:

- a. Pemberdayaan Kawasan kampung nelayan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bagi komunitas nelayan.

Melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha, dan dukungan teknis lainnya. Nelayan didorong untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan perikanan, agar meningkatkan pendapatan mereka.

- b. Pemberdayaan Kawasan kampung nelayan juga dilakukan melalui pengembangan usaha usaha alternatif di luar perikanan, seperti agrowisata, kerajinan lokal, atau hilirisasi produk perikanan. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja dan membuat komunitas lebih tangguh terhadap persaingan global.
- c. Pemberdayaan Kawasan kampung nelayan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Melalui pelatihan dan pendidikan tentang praktik perikanan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam, nelayan dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga ekosistem laut dan lingkungan hidup di kawasan pesisir.
- d. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, pemberdayaan Kawasan kampung nelayan bertujuan untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola sumber daya manusia dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- e. Secara keseluruhan, pemberdayaan Kawasan kampung nelayan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh bagi anggota komunitas nelayan, termasuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mengurangi kemiskinan, dan turut serta mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Untuk implementasi kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap adalah:

1. Asuransi Nelayan

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan memberikan dan pendistribusian kepada kelompok nelayan di Kabupaten/Kota
3. Sosialisasi tentang Peraturan Penangkapan dan Pelatihan atau Bimtek Teknik Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan
5. Peningkatan akses permodalan
6. Sertifikasi Sehat Nelayan

2. Kawasan Kampung Perikanan Budidaya

Pemberdayaan Kawasan Kampung Budidaya Perikanan juga sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di daerah. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya Kawasan kampung perikanan budidaya antara lain :

- a. Budidaya perikanan menjadi alternatif yang baik bagi nelayan tradisional yang bergantung pada penangkapan ikan di laut atau sungai.
- b. Budidaya perikanan meningkatkan ketersediaan pangan protein hewani bagi masyarakat.
- c. Pengembangan Kawasan kampung perikanan budidaya menciptakan lapangan kerja lokal dan menggerakkan ekonomi di daerah.
- d. Pemberdayaan Kawasan kampung perikanan budidaya mempromosikan inovasi dan pengembangan teknologi baru dalam bidang budidaya perikanan.
- e. Dengan mengembangkan budidaya perikanan yang berkelanjutan maka Kawasan kampung perikanan budidaya meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Implementasi kegiatan bidang budidaya perikanan dan P2HP yaitu:

1. Pemberian bibit dan pakan ikan

2. Pemberian sarana dan prasarana pembudidayaan ikan seperti kolam bioflok, kolam terpal, mesin pembuat pakan, mesin pakan otomatis dan sarana pengangkutan kepada kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten/Kota
3. Pembangunan Cold Storage
4. Pembangunan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan
5. Pelatihan/ bimtek tentang CBIB, CPIB dan pengolahan hasil perikanan.
6. Model Kawasan/ Kampung Budidaya dilakukan dengan membuat satu daerah sebagai model perikanan budidaya dengan memberikan bantuan benih/ bibit ikan, pakan ikan, saran prasarana perikanan yang mendukung terwujudnya kampung perikanan budidaya.
7. Pembangunan tempat/wadah sebagai hilirisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Ikan
8. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan

3. Perlindungan dan Konservasi Laut

Perlindungan dan konservasi laut adalah upaya kolaboratif yang melibatkan Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Ilmuwan, Masyarakat Sipil, dan Sektor Swasta untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

1. Penetapan kawasan konservasi
2. Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan
3. Pengendalian pencemaran laut
4. Pemulihan terumbu karang
5. Pendidikan dan kesadaran masyarakat
6. Penegakan hukum
7. Kerjasama Internasional.

Implementasi kegiatan pada Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara lain :

1. Rehabilitasi ekosistem perairan laut berupa transplantasi terumbu karang
2. Kegiatan bulan cinta laut (bersih pantai, penanaman mangrove, kapasitas bulding bagi generasi muda pesisir terhadap pelestarian lingkungan)
3. Pembuatan Ranperda terkait rencana zona dan Kawasan konservasi di wilayah laut serta pulau-pulau kecil
4. MPA bagi kelompok masyarakat pesisir

4. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan komponen penting dari upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan laut secara keseluruhan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berupa :

1. Pemantauan aktifitas penangkapan ikan
2. Pengawasan hilirisasi produk perikanan
3. Pencegahan IUU Fishing
4. Pengendalian pencernaan laut
5. Pengelolaan zonasi dan Kawasan konservasi

Implementasi kegiatan di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan antara lain :

1. Pembinaan terhadap kelompok pengawas masyarakat perikanan
2. Sosialisasi tentang peraturan terbaru
3. Pengawasan terhadap pemanfaatn sumberdaya perikanan tangkap dari tindakan penggunaan API dan alat bantu penangkapan yang tidak sesuai aturan
4. Pengawasan terhadap hilirisasi atas produk hasil perikanan
5. Fasilitasi nelayan yang tertangkap oleh militer negara tetangga
6. Pencegahan konflik antar nelayan.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2025-2029
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan	Ton/Tahun	550.059,52	558.427	565.078,35	625.002,89	649.136,46	684.400,19
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	391.128	395.427	399.726	427.103,34	435.701,34	463.078,68
				Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	158.931,52	163.000	165.352,35	197.899,55	213.435,12	221.321,51
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	101,32	101	102,54	103,32	104,1	105,43
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	97	98	98	99	100	101
				Luasan Kawasan konservasi pesisir dan perairan	Hektar	210403,53	27340,41	7703,41	1415,36	1880,91	9479,49

3.4 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan Format Gender Analysis Pathway (GAP), Anggaran Gender (GBS) dan TOR/ KAK Pelaksanaan Kegiatan.

Pada rencana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di dalam Ranwal Renja tahun 2026 terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang disusun dengan Format GAP, GBS serta menyusun TOR/ KAK pelaksanaan Kegiatan antara lain :

Tabel 3.1. Sub Kegiatan 1 dengan FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2	Indikator kinerja sub kegiatan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	Tujuan sub kegiatan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
4	Analisa situasi	Salah satu implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah melalui kegiatan Asuransi Nelayan sebagai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan. Jumlah nelayan di Sumatera Utara sebanyak 170.274 orang yang didominasi oleh laki-laki. Hingga tahun 2024 yang tercatat menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera sebanyak 64.557 orang. Faktor Kesenjangan Profesi nelayan didominasi oleh laki-laki karena memerlukan kekuatan fisik dalam melakukan pekerjaannya. Nelayan baik nelayan laut maupun perairan darat utamanya memiliki keahlian mengoperasikan sampun dan alat penangkapan ikan yang tidak semua perempuan bisa melakukan. Namun demikian, beberapa perempuan juga berprofesi sebagai nelayan dengan jenis kegiatan penangkapan ikan yang tidak memerlukan kekuatan fisik yang cukup berat seperti nelayan kerang di pinggiran pantai, memancing atau menjala. Sebab Kesenjangan internal : 1. Peran fungsi pokja dan Focal Point belum maksimal 2. Belum adanya data terpilah yang update mengenai jumlah nelayan Wanita 3. Belum adanya penetapan kuota bagi perempuan penerima asuransi Sebab Kesenjangan Eksternal : 1. Belum adanya pengelompokan dan sosialisasi kegiatan penangkapan ikan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Terbatasnya Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk menampung bantuan premi asuransi nelayan bagi perempuan nelayan
5	Rencana Aksi	1. Memberikan sosialisasi dan Advokasi kepada tim Pokja dan Focal Point 2. Identifikasi jumlah perempuan yang berprofesi sebagai nelayan dan belum menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan; 3. Koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab/Kota untuk melakukan pelatihan ketrampilan penangkapan ikan bagi perempuan sehingga profesi perempuan nelayan bertambah. 4. Menetapkan Kuota khusus penerima Asuransi Nelayan
6	Alokasi Anggaran Output sub Kegiatan	Rp. 1.209.600.000
7	Dampak/hasil Output sub Kegiatan	Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesehatan kerja bagi Nelayan Wanita

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Output sub kegiatan : Jumlah Nelayan Penerima Asuransi Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap Sasaran : Nelayan	Salah satu implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah melalui kegiatan Asuransi Nelayan sebagai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan. Jumlah nelayan di Sumatera Utara sebanyak 170.274 orang yang didominasi oleh laki-laki. Hingga tahun 2024 yang tercatat menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera sebanyak 64.557 orang.	Faktor Kesenjangan Profesi nelayan didominasi oleh laki-laki karena memerlukan kekuatan fisik dalam melakukan pekerjaannya. Nelayan baik nelayan laut maupun perairan darat utamanya memiliki keahlian mengoperasikan sampan dan alat penangkapan ikan yang tidak semua perempuan bisa melakukan. Namun demikian, beberapa perempuan juga berprofesi sebagai nelayan dengan jenis kegiatan penangkapan ikan yang tidak memerlukan kekuatan fisik yang cukup berat seperti nelayan kerang di pinggiran pantai, memancing atau menjala.	Sebab Kesenjangan internal : 1. Peran fungsi pokja dan Focal Point belum maksimal 2. Belum adanya data terpilah yang update mengenai jumlah nelayan Wanita 3. Belum adanya penetapan kuota khusus wanita penerima asuransi	Sebab Kesenjangan Eksternal : 1. Belum adanya pengelompokkan dan sosialisasi kegiatan penangkapan ikan yang bisa dilakukan oleh perempuan. 2. Adanya stigma di masyarakat bahwa pekerjaan nelayan hanya cocok dilakukan oleh kaum pria	Reformulasi Tujuan : Peningkatan ketrampilan penangkapan ikan bagi perempuan nelayan dan pengalokasian bantuan premi asuransi nelayan bagi perempuan nelayan secara proporsional	Rencana Aksi : 1. Identifikasi jumlah perempuan yang berprofesi sebagai nelayan dan belum menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan; 2. Koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab/Kota untuk melakukan pelatihan ketrampilan penangkapan ikan bagi perempuan sehingga profesi perempuan nelayan bertambah. 3. Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan kepada Tim Pokja dan Focal Point Dinas Mengenai Kesetaraan Gender 4. Menetapkan Kuota khusus penerima Asuransi Nelayan	Data Dasar (Base-line) Jumlah Nelayan yang menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2024 sebanyak 6.000 orang dengan perkiraan terdiri dari : - Laki-Laki: 5.200 Orang - Perempuan: 800 Orang	Indikator Gender Output : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Utara Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 391.128 Ton Outcome : •Meningkatnya jumlah Nelayan Wanita yang menerima Premi Asuransi • Indikator Kinerja Jumlah nelayan Wanita yang menerima Asuransi Nelayan sebanyak 800 orang Dampak : Perlindungan keselamatan kerja dan Kesehatan kerja bagi Nelayan Wanita

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

FORM KAK / TOR

Program		PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Sasaran Program		Nelayan
Kegiatan		Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil
Sub Kegiatan		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Inpres 9 Th 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Th 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah 3. Peraturan Mentri PPPA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender 4. Surat Edaran 4 Menteri (Bappenas, Menteri Keuangan, Mentri Dalam Negri, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) : no. 050/4379A/SJ., No. SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasonal Percepatan PUG Melalui Perencanaan Dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). 5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 51/ PERMEN- KP/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan Dan Perikanan di Daerah
	Gambaran Umum	Salah satu implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah melalui kegiatan Asuransi Nelayan sebagai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan. Jumlah nelayan di Sumatera Utara sebanyak 170.274 orang yang didominasi oleh laki-laki. Hingga tahun 2024 yang tercatat menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera sebanyak 64.557 orang. Faktor Kesenjangan Profesi nelayan didominasi oleh laki-laki karena memerlukan kekuatan fisik dalam melakukan pekerjaannya. Nelayan baik nelayan laut maupun perairan darat utamanya memiliki keahlian mengoperasikan sampan dan alat penangkapan ikan yang tidak semua perempuan bisa melakukan. Namun demikian, beberapa perempuan juga berprofesi sebagai nelayan dengan jenis kegiatan penangkapan ikan yang tidak memerlukan kekuatan fisik yang cukup berat seperti nelayan kerang di pinggiran pantai, memancing atau menjala. Sebab Kesenjangan internal : 1. Peran fungsi pokja dan Focal Point belum maksimal 2. Belum adanya data terpilah yang update mengenai jumlah nelayan Wanita Sebab Kesenjangan Eksternal : 1. Belum adanya pengelompokkan dan sosialisasi kegiatan penangkapan ikan yang bisa dilakukan oleh perempuan. 2. Terbatasnya Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk menampung bantuan premi asuransi nelayan bagi perempuan nelayan
Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Tahapan Kegiatan • Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota dalam rangka penetapan penerima Asuransi Nelayan • Melakukan pengumpulan dan verifikasi terkait data nelayan penerima Asuransi • Melakukan koordinasi dan pendaftaran peserta baru untuk nelayan penerima asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan • Melaksanakan pendistribusian kartu peserta Asuransi melalui Dinas Kelautan dan

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

		Perikanan Kabupaten / Kota 2. Sasaran Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap - Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil - Sub Kegiatan : Penyediaan Prasana Usaha Perikanan Tangkap - Output sub kegiatan: Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - Tujuan Sub kegiatan: Meningkatkan produksi perikanan tangkap - Sasaran Sub Kegiatan : Nelayan 3. Penerima manfaat - Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Utara - Meningkatnya jumlah Nelayan Wanita di Provinsi Sumatera Utara yang menerima premi asuransi - Meningkatnya kemampuan / keterampilan nelayan Wanita di Provinsi Sumatera Utara
	Indikator Kinerja	- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 391.128 Ton - Jumlah nelayan Wanita yang telah mendapatkan premi Asuransi 1.525 orang
	Batasan Kegiatan	Pemberian Premi Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Nelayan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan keikutsertaan nelayan Wanita pada Kelompok nelayan penerima bantuan dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap
Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan		• Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota dalam rangka penetapan penerima Asuransi Nelayan • Melakukan pengumpulan dan verifikasi terkait data nelayan penerima Asuransi • Melakukan koordinasi dan pendaftaran peserta baru untuk nelayan penerima asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan • Melaksanakan pendistribusian kartu peserta Asuransi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota
Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan		23 Kab Kota
Pelaksana& Penanggungjawab Sub Kegiatan		Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
Jadwal		Tahun 2024
Biaya		Rp. 1.209.600.000,-

**Tabel 3.2. Sub Kegiatan dengan FORM PERNYATAAN ANGGARAN
GENDER (PAG/GBS)**

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
2	Indikator kinerja sub kegiatan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
3	Tujuan sub kegiatan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	
4	Analisa situasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara merupakan Organisasi perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Nelayan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan berupa sarana Usaha Perikanan Tangkap kepada kelompok kelompok nelayan yang sudah memenuhi syarat. Jumlah kelompok Nelayan yang saat ini terdaftar di Provinsi Sumatera Utara sebanyak lebih kurang 100 kelompok dengan perbandingan jumlah anggota laki laki sebanyak 80 % dan jumlah anggota kelompok perempuan sebanyak 20 % di setiap kelompok nelayan yang ada. Bantuan Sarana yang diberikan kepada kelompok nelayan berupa Alat Bantuan Penangkapan Ikan, Mesin Kapal Perikanan dan Mesin Genset Isu dan Faktor Kesenjangan Gender dapat ditemukan dengan masih sedikitnya Wanita nelayan yang terdaftar dan aktif dalam kelompok nelayan penerima bantuan, selain itu Wanita juga masih kurang diberdayakan dalam penggunaan bantuan Sarana yang diberikan Penyebab Internal nya berupa : 1. Peran fungsi pokja dan Focal Point yang belum maksimal 2. Belum adanya data terpilah yang update mengenai jumlah nelayan Wanita 3. Belum adanya form verifikasi mengenai syarat penerima bantuan Penyebab eksternal nya berupa : 1. Adanya Stigma Masyarakat bahwa Laki laki lebih mampu bekerja sebagai nelayan 2. Kurangnya Kemampuan Wanita dalam menggunakan Sarana Prasarana Perikanan	
5	Rencana Aksi	Aktivitas 1	Memberikan sosialisasi dan Advokasi kepada tim Pokja dan Focal Point
		Aktivitas 2	Menyusun data terpilah jumlah nelayan Wanita dan pria
		Aktivitas 3	Memberikan Pelatihan kepada Nelayan Wanita
6	Alokasi Anggaran Output sub Kegiatan		Rp. 1.209.600.000
7	Dampak/hasil Output sub Kegiatan		Meningkatnya jumlah nelayan wanita yang dapat berperan aktif dalam kelompok kelompok nelayan

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Output Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Tujuan Sub kegiatan: Meningkatkan produksi perikanan tangkap Sasaran Sub Kegiatan : Masyarakat / Kelompok Nelayan	1. Jumlah kelompok Nelayan yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 100 Kelompok 2. Jumlah anggota laki laki dalam setiap kelompok nelayan rata rata sebanyak 30 s.d 40 orang, dan jumlah anggota perempuan di tiap kelompok rata rata sebanyak 10 s.d 15 orang. 3. Bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan berupa Alat Bantuan Penangkapan Ikan, Mesin	Isu Gender : Jumlah Nelayan Laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan Nelayan Wanita khususnya dalam Kelompok Nelayan.			Kebijakan dan Rencana Ke Depan : Menyusun dan menetapkan keseimbangan antara jumlah nelayan laki-laki dan nelayan wanita.		Pengukuran Hasil : Peningkatan produksi perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan wanita.	
		Faktor Kesenjangan Akses : Masih sedikitnya Wanita nelayan yang terdaftar dan aktif dalam kelompok nelayan penerima bantuan Partisipasi : Jumlah Anggota Nelayan	Sebab Kesenjangan Internal 4. Peran fungsi pokja dan Focal Point belum maksimal 5. Belum adanya data terpilih yang update mengenai	Sebab Kesenjangan Eksternal 1. Kurangnya Kemampuan Wanita dalam menggunakan Sarana Prasarana Perikanan 2. Adanya Stigma Masyarakat bahwa Laki laki lebih mampu	Reformulasi Tujuan Meningkatkan keikut sertaan nelayan Wanita pada Kelompok nelayan penerima bantuan dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan	Rencana Aksi 1. Memberikan sosialisasi dan Advokasi Pokja dan Focal Point 2. Menyusun data terpilih jumlah nelayan Wanita dan pria	Data Dasar (Base-line) Jumlah Wanita yang terdaftar dalam Kelompok Nelayan sebanyak 300 orang Jumlah Wanita Nelayan yang pernah mendapat pelatihan sebanyak 120 orang	Indikator Gender Output : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Utara Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 391.128

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kapal Perikanan dan Mesin Genset	Pria lebih banyak daripada Wanita Kontrol : Perempuan kurang diberi kesempatan dalam menggunakan bantuan sarana prasarana yang diberikan Manfaat : Masih rendahnya kemampuan Wanita dalam menggunakan sarana prasarana perikanan	jumlah nelayan Wanita 6. Belum adanya form verifikasi mengenai penerima bantuan	bekerja sebagai nelayan	tangkap	3. Memberikan Pelatihan kepada Nelayan Wanita		Ton Outcome : Rumusan Kinerja Meningkatnya jumlah Nelayan Wanita di Provinsi Sumatera Utara Indikator Kinerja: Jumlah nelayan Wanita yang terdaftar dalam kelompok nelayan sebanyak 300 orang Dampak : Jumlah Nelayan Wanita agar ditingkatkan

FORM KAK / TOR

Program :		PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Sasaran Program :		Masyarakat / Kelompok Nelayan
Kegiatan :		Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil
Sub Kegiatan :		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Inpres 9 Th 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Th 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 3. Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender 4. Surat Edaran 4 Menteri (Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) : no. 050/4379A/SJ., No. SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG Melalui Perencanaan Dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). 5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 51/ PERMEN- KP/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan Dan Perikanan Di Daerah
	Gambaran Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara merupakan Organisasi perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Nelayan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan berupa sarana Usaha Perikanan Tangkap kepada kelompok kelompok nelayan yang sudah memenuhi syarat. Jumlah kelompok Nelayan yang saat ini terdaftar di Provinsi Sumatera Utara sebanyak lebih kurang 100 kelompok dengan perbandingan jumlah anggota laki laki sebanyak 80 % dan jumlah anggota kelompok perempuan sebanyak 20 % di setiap kelompok nelayan yang ada. Bantuan Sarana yang diberikan kepada kelompok nelayan berupa Alat Bantuan Penangkapan Ikan, Mesin Kapal Perikanan dan Mesin Genset Isu dan Faktor Kesenjangan Gender dapat ditemukan dengan masih sedikitnya Wanita nelayan yang terdaftar dan aktif dalam kelompok nelayan penerima bantuan, selain itu Wanita juga masih kurang diberdayakan dalam penggunaan bantuan Sarana yang diberikan Penyebab Internal nya berupa : 1. Peran fungsi pokja dan Focal Point yang belum maksimal 2. Belum adanya data terpilah yang update mengenai jumlah nelayan Wanita 3. Belum adanya form verifikasi mengenai syarat penerima bantuan Penyebab eksternal nya berupa : 1. Adanya Stigma Masyarakat bahwa Laki laki lebih mampu bekerja sebagai nelayan 2. Kurangnya Kemampuan Wanita dalam menggunakan Sarana Prasarana Perikanan

	Uraian Kegiatan	4. Tahapan Kegiatan • Menerima proposal permintaan bantuan sarana usaha perikanan tangkap dari Kelompok Nelayan calon penerima bantuan. • Melakukan Verivikasi data Kelompok Nelayan Calon Penerima Bantuan • Melakukan peninjauan Langsung ke lokasi tempat kelompok nelayan calon penerima bantuan beroperasi • Menetapkan jenis bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan calon kelompok nelayan penerima bantuan • Mendistribusikan bantuan berupa sarana usaha perikanan tangkap kepada kelompok nelayan yang telah disetujui / ditetapkan • Melaksanakan evaluasi terkait bantuan sarana usaha perikanan tangkap yang telah didistribusikan 5. Sasaran Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap - Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil - Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Output sub kegiatan: Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Tujuan Sub kegiatan: Meningkatkan produksi perikanan tangkap - Sasaran Sub Kegiatan : Masyarakat / Kelompok Nelayan 6. Penerima manfaat - Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Utara - Meningkatnya jumlah Nelayan Wanita di Provinsi Sumatera Utara - Meningkatnya kemampuan / keterampilan nelayan Wanita di Provinsi Sumatera Utara
	Indikator Kinerja	- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 482.343,21 Ton - Jumlah nelayan Wanita yang terdaftar dalam kelompok nelayan sebanyak 300 orang
	Batasan Kegiatan	Pemberian Bantuan Sarana Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan yang sudah terverivikasi
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan keikut sertaan nelayan Wanita pada Kelompok nelayan penerima bantuan dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap
Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan		• Menerima proposal permintaan bantuan sarana usaha perikanan tangkap dari Kelompok Nelayan calon penerima bantuan. • Melakukan Verivikasi data Kelompok Nelayan Calon Penerima Bantuan • Melakukan peninjauan Langsung ke lokasi tempat kelompok nelayan calon penerima bantuan beroperasi • Menetapkan jenis bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan calon kelompok nelayan penerima bantuan • Mendistribusikan bantuan berupa sarana usaha perikanan tangkap kepada kelompok nelayan yang telah disetujui / ditetapkan • Melaksanakan evaluasi terkait bantuan sarana usaha perikanan tangkap yang telah didistribusikan
Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan		6 Kab/ Kota (Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal)
Pelaksana& Penanggungjawab Sub Kegiatan		Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
Jadwal		Tahun 2024
Biaya		Rp. 1.209.600.000,-

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2025-2029 sesuai periode Renstra tahun 2025-2029 telah ditetapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu :

Tabel 4.1
Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Formulasi
Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Jumlah Produksi Hasil Perikanan	Produksi Perikanan = Jumlah Hasil Perikanan
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap dalam Waktu Tertentu	Produksi Perikanan Tangkap = Jumlah Hasil Perikanan Tangkap
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Budidaya dalam Waktu Tertentu	Produksi Perikanan Budidaya = Jumlah Hasil Perikanan Budidaya
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Perbandingan Indeks harga yang diterima nelayan (lt) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (lb)	NTN = Harga yang diterima nelayan (lt)/ harga yang dibayar nelayan (lb)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Formulasi
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib)	$NTPi = \text{Harga yang diterima nelayan (It)} / \text{harga yang dibayar pembudidaya (Ib)}$
	Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan adalah Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	Luasan kawasan konservasi Pesisir dan Perairan = Pengelolaan Kawasan Baru dan tambahan

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Ranwal Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 diuraikan pada tabel berikut (*Lampiran*).

4.3. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru diintegrasikan dalam setiap lini pembangunan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan potensi kelautan secara bijak. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. Kedua pendekatan ini tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan diarahkan untuk membangun keseimbangan antara kemajuan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan mengadopsi prinsip keberlanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya

mengubah paradigma pembangunan daerah agar lebih berwawasan lingkungan dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim global. Program prioritas ini bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam ekonomi daerah melalui dua jalur utama, yakni ekonomi hijau yang berbasis kelestarian ekosistem daratan dan ekonomi biru yang mengoptimalkan potensi pesisir dan kelautan.

Pengembangan ekonomi biru difokuskan pada optimalisasi potensi kelautan dan perikanan, yang merupakan sektor strategis di provinsi ini. Pembangunan pelabuhan perikanan di tiga wilayah pesisir—Nias Selatan, Nias Utara, dan Tanjung Balai—ditujukan untuk memperkuat infrastruktur logistik hasil laut, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan efisiensi pemasaran hasil perikanan. Di sisi pemberdayaan nelayan, pemerintah menyediakan kapal dan alat tangkap ramah lingkungan di tujuh kabupaten/kota, yang bertujuan meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Penguatan rantai dingin perikanan dilakukan melalui pembangunan cold storage bertenaga energi baru dan terbarukan (EBT), seperti tenaga surya, yang mampu menjaga mutu hasil tangkapan dan memperpanjang umur simpan produk. Selain itu, pelatihan pengolahan hasil laut serta pemberian bantuan peralatan untuk usaha budidaya ikan menjadi strategi dalam meningkatkan nilai tambah produk kelautan. Sumatera Utara juga mendorong pengembangan energi laut dan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di lima lokasi, yang bertujuan memperkuat infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi pesisir.

Program Prioritas Pembangunan ini menunjukkan sinergi yang kuat dengan arah kebijakan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029. Pengembangan ekonomi biru secara

strategis mempertegas komitmen Sumatera Utara dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip blue economy yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa mengorbankan daya regeneratif ekosistem. Program penguatan infrastruktur pelabuhan, distribusi alat tangkap ramah lingkungan, hingga pengembangan energi laut menjadi bagian dari kontribusi Sumatera Utara terhadap ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan, sekaligus memperkuat resilience ekonomi pesisir terhadap ancaman perubahan iklim. Dengan strategi yang terintegrasi ini, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan barat Indonesia, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar peningkatan angka PDRB, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sementara itu, melalui pengembangan ekonomi biru, Sumatera Utara menegaskan komitmennya pada pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut. Program seperti pembangunan pelabuhan perikanan, penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan pengolahan hasil laut, pembangunan cold storage bertenaga surya, serta inisiatif energi laut menunjukkan bahwa provinsi ini turut mengimplementasikan pendekatan ekonomi biru sebagaimana didorong oleh RPJMN. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga menjaga ekosistem laut dan memperkuat ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan.

4.4. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Provinsi Sumatera Utara mengembangkan dan menerapkan prinsip ekonomi biru, yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor, seperti perikanan, kelautan, pariwisata pesisir, energi terbarukan berbasis laut, dan pelestarian ekosistem laut. Indeks ini mengukur kinerja suatu wilayah dalam mengelola sumber daya laut, termasuk dalam hal keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah laut, serta perlindungan terhadap biodiversitas laut. Peningkatan indeks ekonomi biru menunjukkan bahwa suatu wilayah semakin sukses dalam mengoptimalkan potensi kelautan tanpa merusak lingkungan, yang penting untuk mendukung kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut. Indeks ini menjadi indikator penting dalam menilai kebijakan dan implementasi ekonomi biru di tingkat nasional maupun daerah, serta untuk memastikan bahwa sektor kelautan berkembang dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tabel Dukungan Prioritas Pembangunan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan ekonomi hijau dan biru	Pengembangan Ekonomi Biru	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Pengembangan/Pembangunan Pelabuhan perikanan di 2 Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan, Kabupaten Asahan	1. Penyediaan Peralatan dan Mesin Pendukung Penangkapan Ikan Terukur. 2. Pembuatan drainase jalan pelabuhan. 3. Rehabilitasi fasilitas pelabuhan (Gedung perbengkelan, mushola, gapura dan Pos)	Pembuatan masterplan Pelabuhan Perikanan di Kab. Asahan dan Kab. Nias Selatan dengan catatan memberikan Hibah Tanah)	1. Rehabilitasi dan perpanjangan Dermaga 2. Penimbunan Jalan Pelabuhan 3. Pembangunan Cold Storage Kapasitas 10 ton, daya listrik dan solar sell	Perbaikan jalan masuk pelabuhan, sanitasi limbah dan air bersih, Penimbunan tanah dan perluasan tanah	Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Kab. Nias Utara		1.500.000.000	21.500.000.000	10.000.000.000	50.000.000.000
		Pengembangan sarana dan prasarana produksi	Pembangunan Kawasan Kampung Nelayan	Kab. Asahan, Kota Tanjung	Membuat Kajian Kampung	Tapanuli Tengah ; Desa Pasar	Deli Serdang ; Desa Percut Kecamatan	Medan ; Kelurahan Bagan Deli	Labuhan Batu Utara ; Kecamatan Kualuh ledong		1.371.405.000	2.470.974.450	1.635.480.000	2.035.480.000

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan	Berkah	Balai, Kab. Tapteng, Kota Sibolga, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Selatan	Nelayan Berkah	Sorkam Kecamatan Sorkam Barat, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 39.356 ton dan jumlah Nelayan 79.426 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 17.228 orang , Alat Tangkap Jaring Aso - aso mata 100 sebanyak 250 unit untuk 5 kelompok (10 org/kelompok), Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang/Gilinet mata	n Percut Sei Tuan, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 39.356 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 10.766 orang, Sampan Bermotor Seruai Uk.9 meter sebanyak 50 unit untuk 5 kelompok (10 org/kel), Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang/Gilinet mata	Kecamatan Medan Belawan , Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 21.239 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 9.768 orang, Sampan 50 unit untuk 5 kelompok (10 org/kel) , Alat Tangkap Jaring Bubu 50 unit,	Desa Simandulang, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 11.329 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 2.211 orang Jumlah 4 kelompok (20 org/kel) Alat tangkap yg dibutuhkan : Jaring senangin sebanyak 200 unit Jaring gembung					

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						x kap.100 ltr sebanyak 50 unit untuk 5 kelompok, mesin donfeng 24 PK sebanyak 10 unit, Mesin Tempel 15 PK sebanyak 10 unit, asuransi nelayan ; 300 orang	200 sebanyak 50 unit utk 5 kel, coolbox kap.200 ltr sebanyak 50 unit utk 5 kel, GPS sebanyak 50 utk 5 kel, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	Jaring Gembung 50 unit, Coolbox kap.200 ltr 50 unit, Keranjang Ikan kap.50 kg sebanyak 50 unit, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	sebanyak 200 unit Perangkap gurita sebanyak 200 unit Pancing sebanyak 200 unit Rawai sebanyak 200 unit, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan; 300 orang					
						Asahan ; Desa pemata ng sei baru Kecamatan Tanjung	Batubara ; Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus, Produksi	Serdang Bedagai ; Desa Bagan Kuala, Kecamatan	Nias Selatan ; Desa Siduaewali Kec. Pulau-Pulau Batu, Produksi		4.035.480.000	2.985.480.000	3.397.980.000	1.785.980.000

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						Balai, Produksi i Perikanan Tangkap 2024 sebesar 59.270 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 12.576 orang, sampan bermotor beserta kelengkapan 10 unit x 5 kelompok (sampan seruai panjang 9 m) , alat tangkap jaring insang mata 100 ; 50	Perikanan Tangkap 2024 sebesar 51.871 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 9.925 orang, Sampan Bermotor Ukuran 7 meter sebanyak 50 unit untuk 5 kel (10 org/kel), Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang Hanyut mata 200 sebanyak 300 set utk 5 kel, Alat	Tj.Berising, Produksi i Perikanan Tangkap 2024 sebesar 27.649 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 8.032 orang, Laminasi Perahu sebanyak 50 unit, GPS Track 10 sebanyak 50 unit, Coolbox x Kap.200 ltr	Perikanan Tangkap 2024 sebesar 8.194 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 8.204 orang,Kapal Motor 4 GT : 3 unit, Alat tangkap : Jaring Insang, Kombinasi Tramel Net, Rawai Kakap, Pancing Ulur sebanyak 150 unit , Coolbox Kap. 100 ltr sebanyak 18 unit, Tambat Labuh, Neon Box,					

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						unit x 5 kelompok, cool box kap 200 liter ; 10 unit x 5 kelompok, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	Tangkap Rawai Ciput sebanyak 50 unit utk 5 kel, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	sebanyak 50 unit, Life Jacket sebanyak 50 unit, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	Asuransi Nelayan ; 300 orang					
						Nias Utara ; Desa Siofabanua, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 14.629 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak	Langkat ; Desa Kwala Gebang Kecamatan Gebang, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 36.664 ton dan jumlah Nelayan Tahun	Mandailing Natal ; Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar	Sibolga ; Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara, Produksi Perikanan Tangkap 2024 sebesar 6.728 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak		12.282.980.000	2.185.480.000	1.300.480.000	2.749.186.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						k 1.123 orang, Rehabilitasi tambatan perahu/jetty untuk tambat labuh kapal/perahu motor nelayan di tangkahan hilimbo wo dusun I Desa Siofaba nua 1 paket, di tangkahan Pantai Umbu dusun I Desa Siofaba nua 1 paket, di tangkahan	2024 sebanyak 26.081 orang, Alat Tangkap Jaring Siakap sebanyak 1.000 pieces untuk 5 kel, Kapal Uk. 4 GT sebanyak 2 unit, coolbox kap.200 ltr sebanyak 50 unit, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	22.198 ton dan jumlah Nelayan Tahun 2024 sebanyak 7.818 orang, Kapal 4 GT sebanyak 2 unit, Coolbox x kap.200 ltr 30 unit, Alat Tangkap Ikan Jaring Gillnet sebanyak 150 unit utk 3 kelompok, Fish Finder 30 unit, Tambat	5.479 orang, Alat Tangkap Jaring Bagan sebanyak 500 bal, genset kap.1.300 watt sebanyak 100 unit, mesin tempel 15 PK sebanyak 20 unit, coolbox kap.100 ltr sebanyak 100 unit, coolboox kap.200 ltr sebanyak 20 unit, alat tangkap jaring pari sebanyak 40 set, mesin donfeng 9 PK					

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						an helera dusun III Desa Siofabanua 1 paket, Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil atau sama dengan 5 GT beserta perlengkapannya sebanyak 10 unit, Pengadaan sarana penangkapan ikan atau alat penangkapan ikan		labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang	sebanyak 30 unit, Tambat labuh, Neon box, asuransi nelayan ; 300 orang					

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						ramah lingkungan beserta perlengkapan sebanyak 10 unit, Pengadaan mesin kapal penangkap ikan untuk perahu/kapal penangkap ikan 23-30 PK yang berukuran lebih kecil dari 5 GT sebanyak 20 unit, cool box 120 L (OCN-F Series) sebanyak								

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						k 50 unit, cool box 220 L (OCN-F Series) sebanyak k 50 unit, cool box 350 L (OCN-F Series) sebanyak k 50 unit, fish finder sebanyak k 20 unit, Asuransi nelayan ; 300 orang								
			Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan	Kab. Langkat (Kepiting/ Udang), Kota Binjai (Ikan Lele),	Membuat Kajian Kampung Budidaya Berkah	Desa masjid Lama dan Desa Dahari Selebar kec Talawi Kab	Desa Mbaruai Kecamatan Sibiru biru Kab Deli Serdang, 1. calon induk ikan	Desa Dokan Kecamatan merek Kab Karo 1. calon	Desa Siofabanua Kecamatan Tuhemberua Kab Nisut 1. Keramba Jaring Apung		8.000.000.000	6.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				Kab. Deli Serdang (Ikan Mas), Kab. Sergei (Ikan Gurami), Kab. Batubara (Ikan Kakap/Kerapu), Kab. Paluta (Ikan Lele), Kab. Tapsel (Ikan Lele), Kab. Nias Utara (Lobster), Kab. Tapteng (Ikan Nila)		Batubara 1. benih ikan Kerapu 100,000 ekor 2. pakan 17,500 Kg 3. peralatan budidaya ikan Kerapu Produksi Kerapu Tahun 2024 sebesar 118.500 Kg	mas 3.000 2. pakan ikan 22.500 kg 3. benih ikan mas 125.000 ekor 4. mesin pakan 2 unit 5. automatic feeder 20 unit 6. dan kendaraan roda 3 1 unit Produksi ikan mas tahun 2024 sebesar 21.547.513 kg	induk ikan mas 2.000 ekor 2. benih ikan mas 100.000 ekor 3. Pakan Ikan 17.500 Kg 4. automati cfeeder 20 Unit 5. Mesin pencetak pakan 2 unit 6. kendaraan roda 3 1 unit Produks	Ramah Lingkungan 14 Unit 2. Benih Lobster 1.000 ekor 3. Pakan Lobster 1.000 Kg 4. Mesin Pencuci jaring 2 Unit Produksi Lobster Tahun 2024 sebesar 4.556 kg					

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
								i Ikan mas Tahun 2024 sebesar 58.274 kg						
						Desa mondan g Kecamatan Sayur Matingg i Kab Tapsel 1. Calon Induk Ikan lele 14.000 ekor 2. pakan induk 6.000 kg 3. benih ikan lele 150,000 ekor 4. pakan benih ikan 12,000 kg, 5. mesin penceta	desa simananos or kec padang bolak Kab Paluta 1. calon induk ikan lele 15.000 ekor 2. pakan ikan 18.000 kg 3. mesin pencetak pakan 6 unit 4. benih ikan lele 150.000	kelurah an bernam a kecamat an Binjai barat Kota Binjai, 1. Calon Induk Ikan Lele 14.500 ekor 2. Benih Ikan lele 150.000 ekor 3. Pakan						

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						k pellet ikan 6 unit, 6. mesin automati cfeeder 20 unit Produksi i Lele Tahun 2024 sebesar 2.2020.523 Kg	ekor 5. automaticfeeder 20 unit dan 6. kendraan roda 3 1 unit. Produksi ikan lele tahun 2024 2.741.109 kg	lkan 18.000 kg 4. Mesin automati cfeeder 20 unit 5. Kendaraan roda 3 1 unit 6. mesin pencetkan pakan ikan 8 unit Prtoduksi ikan Mas tahun 2024 sebesar 58.274 kg						
						Kelurahan tualang	Desa muara sibabangu							

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						kecamatan Perbaungan Kab Sergai 1. benih ikan gurame 100.000 ekor 2. pakan ikan 10.000 kg 3. mesin pencetak pellet ikan 4 unit, 4. automati cfeeder 10 unit Produksi Gurame Tahun 2024 sebesar 1.653.819 Kg	n kecamatan lumut Kab Tapteng 1. calon induk ikan nila 3.000 ekor 2. pakan ikan 20.000 kg, 3. benih ikan nila 125.000 ekor 4. mesin pencetak pakan 4 unit, 5. automaticfeeder 20 unit, 6. kendaraan roda 3 1							

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
							unit Produksi ikan Nila Tahun 2024 38.000 Kg							
						Desa Pasar rawa Kecamatan gebang Kab Langkat 1. benur udang 1.000.000 ekor, 2. pakan udang 10.000 kg, 3. automati c feeder 10 unit, 4. sarana budiday a udang/ kincir 20 pompa								

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						2 dan genset 1 unit Produksi i Udang Tahun 2024 sebesar 25.050.249 Kg								
		Peningkatan Kualitas, Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan dengan Tetap Menjaga Ekosistem Laut	Pembangunan <i>Cold Storage</i> dengan menggunakan tenaga surya	Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Tapteng, Sibolga, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Selatan		Kab. Tapanuli Tengah (Desa Pasar Sorkam Kec. Sorkam Barat) Cold Storage kapasitas 5 ton.	Kab. Batubara (Desa Tali Air Permai Kec. Nibung Hangus) Cold Storage kapasitas 5 Ton	Kota Medan (Kel. Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan) kelompok pengola han 5 kelompok	Kab. Labuhan Batu Utara		5.000.000.000	5.000.000.000	500.000.000	500.000.000
						Kab. Asahan		Kab. Serdang Bedagai Desa Bagan Kuala, Kecamatan	Kab. Nias Selatan		500.000.000		500.000.000	500.000.000

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
								an Tj.Beringin						
						Kab. Nias Utara (Desa Siofabanua Kec. Tuhemb erua), Jumlah Kelompok Pengola han Hasil Perikan an 7 Kelompok Membut uhkan Pabrik Es kapasita s 5 Ton		Kab. Mandaili ng Natal	Kota Sibolga (Kel. Sibolga Ilir Kec. Sibolga Utara) Rehab Cold Storage		5.000.000.000		500.000.000	5.000.000.000
		Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan perikanan	Pelatihan dan pemberi an bantuan peralatan pengolahan ikan kepada	Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Tapteng , SibKab Langkat (Kepitin		Pelatihan teknis budidaya , serta penagan an hama dan penyakit ikan di	Pelatihan teknis budidaya, serta penanganan hama dan penyakit ikan di Kab	Pelatihan teknis budidaya , serta penanga nan hama dan	Pelatihan teknis budidaya, serta penanganan hama dan penyakit ikan Kab		200.000.000	150.000.000	100.000.000	75.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

Prioritas Pembangunan	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Lokasi	Target					Kebutuhan Anggaran				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			nelayan dan petani pembudi daya ikan	g,Udang), Binjai(Lele),Kab Deli Serdang (Ikan Mas),Karo (Ikan Mas), Sergai(Ikan)		Kab Batubara , Kab Tapsel, Kab Sergai, Kab Langkat	Deli Serdang, Kab Paluta, Kab Tapteng	penyakit ikan Kab Karo, Kota Binjai,	Nisut					
		Penguatan Logistik dan Sarana Pengisian Bahan Bakar Nelayan	Pengembangan Sistem Pengembangan Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	Medan, Langkat, Deli Serdang , Serdang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai, Sibolga, Mandailing Natal, Batubara, Tapanuli Tengah		10 kab/kota, 41 SPBN	10 kab/kota, 41 SPBUN	10 kab/kota, 41 SPBUN	10 kab/kota, 41 SPBUN		200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas KP	6 Dokumen	22.700.000	APBD		6 Dokumen	27.834.400
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas KP	109 Orang/ Bulan	20.034.738.000	APBD		109 Orang/ Bulan	20.034.738.000
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas KP	1 Dokumen	64.920.000	APBD		1 Dokumen	64.920.000

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3	25	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas KP	5 Unit	36.400.000	APBD		5 Unit	36.400.000
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas KP	20 Orang	251.855.000	APBD		20 Orang	251.855.000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas KP	1 Paket	46.560.500	APBD		1 Paket	46.560.500
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas KP	2 Paket	127.099.689	APBD		2 Paket	127.099.689
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas KP	2 Paket	63.883.772,56	APBD		2 Paket	64.883.775
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas KP	12 Laporan	120.787.300	APBD		12 Laporan	120.787.300

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Provinsi	2 Laporan	437.000.000	APBD		2 Laporan	437.000.000
3	25	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas KP	10 Dokumen	8.160.000	APBD		10 Dokumen	8.160.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provsu	1 Laporan	31.225.000	APBD		1 Laporan	31.225.000
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provsu	1 Laporan	472.300.000	APBD		1 Laporan	472.300.000
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas KP	1 Laporan	5.327.485.554	APBD		1 Laporan	5.327.485.554
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	320.830.300	APBD		10 Unit	320.830.300
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provsu	10 Unit	119.400.000	APBD		10 Unit	119.400.000
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Ruangan Kantor	Dinas KP	1 Unit	257.805.670,44	APBD		-	-
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44000 H	199.998.000	APBD		44000 H	199.998.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 H	249.765.510	APBD		50 H	249.765.510
3	25	02	1.01	0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								
3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
3	25	02	1.03	0003	Pelibatan Masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terlibat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	99.982.700	APBD		100 Orang	100.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pengawasan							
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620 Unit, 7.000 Asuransi Nelayan	4.695.080.000	APBD		620 Unit, 7.000 Asuransi Nelayan	4.695.080.000
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496 Unit	2.303.500.000	APBD		496 Unit	2.303.500.000
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								
3	25	04	1.05	0010	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	- Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan yang mendapatkan bantuan peralatan dan mesin - Jumlah sarana dan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Unit	3.999.999.988	APBD		75 Unit	3.999.999.988

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						prasarana yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan							
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Pelaku Usaha, 1 Docking Kapal	399.997.300	APBD		20 Pelaku Usaha, 1 Docking Kapal	399.997.300
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Pelaku Usaha	78.488.000	APBD		10 Pelaku Usaha	78.488.000
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	12 Kelompok Masyarakat	25.810.000	APBD		12 Kelompok Masyarakat	25.810.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa						
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Pelaku Usaha	100.000.250	APBD		20 Pelaku Usaha	100.000.250
3	25	05	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Pelaku Usaha	50.000.100	APBD		10 Pelaku Usaha	50.000.100
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								
3	25	06	1.2	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	49.980.000	APBD		1 Kegiatan	49.980.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan Produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan Produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing							
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
3	25	06	1.03	0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	149.941.100	APBD		1 Dokumen	149.941.100
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit Usaha	299.985.488	APBD		10 Unit Usaha	299.985.488
					UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	176.415.000	APBD		1 Laporan	176.415.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu	Semua Kota/Kab, Semua	1 Kegiatan	101.186.358	APBD		1 Kegiatan	101.186.358

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	222.393.290	APBD		1 Kegiatan	222.393.290

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi	Fungsi Pemerintahan dan	Semua	1 Kegiatan	300.000.000	APBD		1 Kegiatan	300.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
					UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai - Asahan								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	185.980.000	APBD		1 Laporan	185.980.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	414.185.943	APBD		1 Kegiatan	414.185.943
					UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	180.000.000	APBD		1 Laporan	180.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	184.600.000	APBD		2 Unit	184.600.000
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	235.272.289	APBD		1 Unit	235.272.289
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat								

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.100.000	APBD		1 Unit	100.100.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 yang memuat rencana dalam kurun waktu satu tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah memperhatikan permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi, juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi, misi yang ditetapkan, ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang dihimpun berdasarkan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara. Program dan Rencana Kerja yang dihasilkan melalui Sinkronisasi tersebut dipadukan dan disinkronkan dengan rencana program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang dituangkan dalam Renja ini.

Program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diupayakan agar terlaksana dengan maksimal berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel, dan untuk keberhasilan dari program dan kegiatan ini sangat diperlukan

partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian tujuan, sasaran dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Tahun 2026 disusun sebagai pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan program dan kegiatan TA 2026. Semoga Ranwal Renja Tahun 2026 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap Aparatur dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara serta mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.

Medan, 30 juli 2025


KEMENTERIAN PERIKANAN
HANIDY S. KRI SIREGAR, S. Sos, MM
Panglima Muda
NIP. 19770826 200312 1 004

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

L A M P I R A N

C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Rekapitulasi Hasil dan Pembahasan Intervensi Dinas Kelautan dan Perikanan ke Kabupaten/Kota pada Desk Kewilayahan Acara Musrenbang Provinsi Sumatera Utara

1. Kabupaten Nias Utara

- ❖ Pembuatan Master Plan Pembangunan Pelabuhan Perikanan (2026) dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan (2029)
 - Perlu adanya lokasi calon Pelabuhan (~~Lahewa~~ atau Tuhemberua)
- ❖ Kampung Nelayan Berkah (2029)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konservasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah nelayan, data produksi penangkapan ikan, jumlah KUB atau koperasi perikanan)
- ❖ Bantuan berupa tambat labuh sampan bermotor dilokasi kampung nelayan berkah, alat penangkap ikan, cooldbox, dan GPS
 - Perlu adanya proposal kelompok dari calon lokasi kampung nelayan berkah
- ❖ Pembangunan Cold storage tenaga surya
 - Perlu adanya lokasi lahan yang clean & clear
 - Perlu adanya calon pengelola cold storage
 - Data produksi perikanan di Kabupaten Nias Utara
- ❖ Pembangunan kampung perikanan budidaya berkah (Budidaya Lobster-2029)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

- Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
- Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
- Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
- Adanya dokumen pendukung (data jumlah pembudidaya ikan, data produksi budidaya ikan, jumlah KUB atau koperasi budidaya perikanan)
- ❖ Pelatihan dan bantuan berupa peralatan pengolahan
 - Perlu adanya proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung perikanan budidaya berkah

2. Kabupaten Tapanuli Selatan

- ❖ Pembangunan kampung perikanan budidaya berkah (ikan Lele - 2026)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi) dan apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah pembudidaya ikan, data produksi budidaya ikan, jumlah KUB atau koperasi budidaya perikanan)
- ❖ Pelatihan & pemberian bantuan peralatan pengolahan & pemberian benih ikan Lele/ pakan
 - Perlu adanya proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung perikanan budidaya berkah

3. Kabupaten Nias Selatan

- ❖ Kampung nelayan berkah (2027)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan

- Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konservasi atau kawasan industri)
- Adanya dokumen pendukung (data jumlah nelayan, data produksi penangkapan ikan, jumlah KUB atau koperasi perikanan)
- ❖ Bantuan berupa tambat labuh sampan bermotor dilokasi kampung nelayan berkah, alat penangkap ikan, cooldbox, dan GPS
 - Perlu adanya proposal kelompok dari calon lokasi kampung nelayan berkah
- ❖ Pembangunan Cold storage tenaga surya
 - Perlu adanya lokasi lahan yang clean & clear
 - Perlu adanya calon pengelola cold storage
 - Data produksi perikanan di Kabupaten Nias Selatan
- ❖ Pembuatan Master Plan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di UPTD PP Pulau Tello (2026)
- ❖ Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di UPTD PP Pulau Tello
 - Rehab dan Perpanjangan Dermaga, Penimbunan Jalan Masuk Pelabuhan Perikanan, dan Pembangunan Cold Storage Kapasitas 10 Ton (2027)
 - Perbaikan Jalan Masuk Pelabuhan Perikanan, Perbaikan Sanitasi limbah dan Persediaan Air Bersih, Penimbunan Lahan dan Perluasan Kawasan Pelabuhan (2028)
- ❖ Pelatihan dan bantuan berupa peralatan pengolahan
 - Perlu adanya proposal kelompok dari calon lokasi kampung nelayan berkah
- ❖ Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan (SPBN)
 - Perlu adanya laporan berupa pemanfaatan kuota BBM bersubsidi
 - Jumlah nelayan pengguna BBM bersubsidi

4. Kota Binjai

- ❖ Pembangunan kampung perikanan budidaya berkah (ikan Lele - 2028)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi) dan apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konservasi atau kawasan industri)

- Adanya dokumen pendukung (data jumlah pembudidaya ikan, data produksi budidaya ikan, jumlah KUB atau koperasi budidaya perikanan)
- ❖ Pelatihan & pemberian bantuan peralatan pengolahan & pemberian benih ikan Lele/pakan
 - Perlu adanya proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung perikanan budidaya berkah

5. Tapanuli Tengah

- ❖ Kampung nelayan berkah (2027)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konservasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah nelayan, data produksi penangkapan ikan, jumlah KUB atau koperasi perikanan)
- ❖ Bantuan berupa tambat labuh sampan bermotor dilokasi kampung nelayan berkah, alat penangkap ikan, cooldbox, dan GPS
 - Perlu adanya proposal kelompok dari calon lokasi kampung nelayan berkah
- ❖ Pembangunan Cold storage tenaga surya
 - Perlu adanya lokasi lahan yang clean & clear
 - Perlu adanya calon pengelola cold storage
 - Data produksi perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah
- ❖ Pembangunan kampung perikanan budidaya berkah (ikan Nila-2027)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah pembudidaya ikan, data produksi budidaya ikan, jumlah KUB atau koperasi budidaya perikanan)

- ❖ Pelatihan dan bantuan berupa peralatan pengolahan, bibit ikan Nila dan pakan ikan
 - Perlu adanya proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung perikanan budidaya berkah
- ❖ Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan (SPBN)
 - Perlu adanya laporan berupa pemanfaatan kuota BBM bersubsidi
 - Jumlah nelayan pengguna BBM bersubsidi

5. Kabupaten Langkat

- ❖ Pembangunan kampung perikanan budidaya berkah (kepiting dan udang vannamei-2026)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah pembudidaya ikan, data produksi budidaya ikan, jumlah KUB atau koperasi budidaya perikanan)
- ❖ Pelatihan dan bantuan berupa peralatan pengolahan, bibit Kepiting/ Udang dan pakan
 - Perlu adanya proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung perikanan budidaya berkah
- ❖ Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan (SPBN)
 - Perlu adanya laporan berupa pemanfaatan kuota BBM bersubsidi
 - Jumlah nelayan pengguna BBM bersubsidi

6. Kabupaten Karo

- ❖ Pembangunan kampung perikanan budidaya berkah (ikan Mas - 2028)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa

- Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
- Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
- Adanya dokumen pendukung (data jumlah pembudidaya ikan, data produksi budidaya ikan, jumlah KUB atau koperasi budidaya perikanan)
- ❖ Pelatihan dan bantuan berupa peralatan pengolahan, bibit ikan Mas dan pakan ikan
 - Perlu adanya proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung perikanan budidaya berkah

7. Kota Tanjung Balai

- ❖ Kampung nelayan berkah (2026)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah nelayan, data produksi penangkapan ikan, jumlah KUB atau koperasi perikanan)
- ❖ Bantuan berupa tambat labuh sampan bermotor dilokasi kampung nelayan berkah, alat penangkap ikan, coolbox, dan GPS
 - Perlu adanya proposal kelompok dari calon lokasi kampung nelayan berkah
- ❖ Pembangunan Cold storage tenaga surya
 - Perlu adanya lokasi lahan yang clean & clear
 - Perlu adanya calon pengelola cold storage
 - Data produksi perikanan di Kota Tanjung Balai
- ❖ Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan (SPBN)
 - Perlu adanya laporan berupa pemanfaatan kuota BBM bersubsidi
 - Jumlah nelayan pengguna BBM bersubsidi

8. Kabupaten Deli Serdang

- ❖ Pembangunan kampung perikanan budidaya berkah (ikan Mas - 2027)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah pembudidaya ikan, data produksi budidaya ikan, jumlah KUB atau koperasi budidaya perikanan)
- ❖ Pelatihan & pemberian bantuan peralatan pengolahan & pemberian benih ikan Mas/pakan
 - Perlu adanya proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung perikanan budidaya berkah
- ❖ Pengembangan stasiun pengisian BBM nelayan di Deli Serdang (laporan data-data ke provinsi)
 - Perlu adanya laporan berupa pemanfaatan kuota BBM bersubsidi
 - Jumlah nelayan pengguna BBM bersubsidi

9. Kota Sibolga

- ❖ Kampung nelayan (2027)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah nelayan, data produksi penangkapan ikan, jumlah KUB atau koperasi perikanan)
- ❖ Cold storage tenaga surya
 - Perlu adanya lokasi lahan yang clean & clear
 - Perlu adanya calon pengelola cold storage
 - Data produksi perikanan di Kota Sibolga
- ❖ Bantuan ke kampung nelayan berupa pembangunan tempat labuh sampan bermotor, API, coolbox dan GPS

- Proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung nelayan
- ❖ Pengembangan SPBN
 - Perlu adanya laporan berupa pemanfaatan kuota BBM bersubsidi
 - Jumlah nelayan pengguna BBM bersubsidi

10. Kabupaten Asahan

- ❖ Kampung nelayan (2026)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah nelayan, data produksi penangkapan ikan, jumlah KUB atau koperasi peikanan)
- ❖ Cold storage tenaga surya
 - Perlu adanya lokasi lahan yang clean & clear
 - Perlu adanya calon pengelola cold storage
 - Data produksi perikanan di Kabupaten Asahan
- ❖ Bantuan ke kampung nelayan berupa pembangunan tempat labuh sampan bermotor, Alat Penangkap Ikan (API), coolbox & GPS
 - Proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung nelayan
- ❖ Pembuatan Master Plan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di UPTD PP Tanjung Balai Asahan (2026)
- ❖ Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di UPTD Tanjung Balai Asahan
 - Rehab dan Perpanjangan Dermaga, Penimbunan Jalan Masuk Pelabuhan Perikanan, dan Pembangunan Cold Storage Kapasitas 10 Ton (2027)
 - Perbaikan Jalan Masuk Pelabuhan Perikanan, Perbaikan Sanitasi limbah dan Persediaan Air Bersih, Penimbunan Lahan dan Perluasan Kawasan Pelabuhan (2028)
- ❖ Pengembangan SPBN

- Perlu adanya laporan berupa pemanfaatan kuota BBM bersubsidi
- Jumlah nelayan pengguna BBM bersubsidi

11. Serdang Bedagai

- ❖ Pembangunan kampung perikanan budidaya berkah (ikan Gurami - 2026)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah pembudidaya ikan, data produksi budidaya ikan, jumlah KUB atau koperasi budidaya perikanan)
- ❖ Pelatihan & pemberian bantuan peralatan pengolahan & pemberian benih ikan Gurami/ pakan
 - Perlu adanya proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung perikanan budidaya berkah
- ❖ Pengembangan stasiun pengisian BBM nelayan di Serdang Bedagai (laporan data-data ke provinsi) antara lain:
 - Perlu adanya laporan berupa pemanfaatan kuota BBM bersubsidi
 - Jumlah nelayan pengguna BBM bersubsidi

12. Padang Lawas Utara

- ❖ Pembangunan kampung perikanan budidaya berkah (ikan Lele - 2027)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih, sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah pembudidaya ikan, data produksi budidaya ikan, jumlah KUB atau koperasi budidaya perikanan)

- ❖ Pelatihan&pemberian bantuan peralatan pengolahan&pemberian benih ikan Lele/pakan
 - Perlu adanya proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung perikanan budidaya berkah

13. Kabupaten Batubara

- ❖ Pembangunan kampung perikanan budidaya berkah (ikan Kerapu/ Kakap - 2026)
 - Surat pengantar dan proposal resmi dari kabupaten/kota
 - Infrastruktur dasar tersedia (Jalan, listrik, air bersih,sanitasi), apabila belum memadai perlu adanya kolaborasi dari APBD kabupaten/kota dan dana desa
 - Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan aktif dalam kelompok/kelembagaan
 - Kesesuaian tata ruang (bukan dalam lokasi yang dilarang seperti kawasan konserfasi atau kawasan industri)
 - Adanya dokumen pendukung (data jumlah pembudidaya ikan, data produksi budidaya ikan, jumlah KUB atau koperasi budidaya perikanan)
- ❖ Pelatihan&pemberian bantuan peralatan pengolahan & pemberian benih ikan Kerapu atau Kakap/ pakan
 - Perlu adanya proposal kelompok yang berasal dari calon lokasi kampung perikanan budidaya berkah

14. Medan

- ❖ Pengembangan stasiun pengisian BBM nelayan di Serdang Bedagei (laporan data-data ke provinsi) antara lain:
 - Perlu adanya laporan berupa pemanfaatan kuota BBM bersubsidi
 - Jumlah nelayan pengguna BBM bersubsidi.

b. Usulan Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD Provsu.